



BAGIAN ANGGARAN 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

---

# LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
AUDITED

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 07 Mei 2025  
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,



	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	20
A.3. Basis Akuntansi	20
A.4. Dasar Pengukuran	20
A.5. Kebijakan Akuntansi	21
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	31
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja Negara	35
B.3. Belanja Pegawai	41
B.4. Belanja Barang	42
B.5. Belanja Modal	43
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	48
C.1. Kas Dibendahara Pengeluaran	48
C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	49
C.3. Belanja Dibayar Dimuka ( <i>Prepaid</i> )	50
C.4. Piutang Bukan Pajak	52
C.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	53
C.6. Piutang Bukan Pajak (neto)	54
C.7. Persediaan	54
C.8. Peralatan dan Mesin	58
C.9. Gedung dan Bangunan	62
C.10. Jalan, Irigasi dan Jaringan	63
C.11. Aset Tetap Lainnya	64
C.12. Konstruksi Dalam Pengerjaan	67
C.13. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	68
C.14. Aset Tak Berwujud	69
C.15. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	70
C.16. Aset Lain-Lain	73
C.17. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	75
C.18. Utang Kepada Pihak ke Tiga	76
C.19. Uang Muka dari KPPN	77
C.20. Utang Jangka Pendek Lainnya	78

C.21. Ekuitas	79
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	80
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	80
D.2. Beban Pegawai	81
D.3. Beban Persediaan	82
D.4. Beban Barang dan Jasa	82
D.5. Beban Pemeliharaan	83
D.6. Beban Perjalanan Dinas	84
D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat	85
D.8. Beban Bantuan Sosial	85
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	85
D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	86
D.11. Beban Lain-lain	86
D.12. Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	87
D.13. Pos-Pos Luar Biasa	87
E. Penjelasan Atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	88
E.1. Ekuitas Awal	88
E.2. Surplus / (Defisit) LO	88
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	88
E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset	88
E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan	89
E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap	89
E.4.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	89
E.4.5. Koreksi Lain-lain	89
E.5. Transaksi Antar Entitas	89
E.6. Ekuitas Akhir	91
F. Pengungkapan Penting Lainnya	92
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	92
F.2. Pengungkapan Lain-Lain	92
VI. Lampiran	
Laporan-laporan Pendukung	

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN UNTUK PERIODE YANG  
BERAKHIR 31 DESEMBER TAHUN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2024 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 14 Februari 2025

Inspektur



Henry Marvin



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2024 Audited sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 07 Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia,



*Pratikno*

**Pratikno**

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun 2024 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara-LRA sampai dengan 31 Desember TA 2024 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.127.807.020 atau mencapai 1611,15% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp70.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp269.413.778.899 atau mencapai 93,96% dari alokasi anggaran sebesar Rp286.736.181.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp158.689.902.771 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.493.524.609, Aset Tetap (neto) sebesar Rp147.081.102.288 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp9.115.275.874.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp8.562.574.368 dan Rp150.127.328.403.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai

dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp329.047.271.142 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp329.047.271.142. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp929.920.681 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp328.117.350.461.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp151.066.925.409 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp328.117.350.461, kemudian ditambah dengan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi senilai (Rp2.227.758) dan Koreksi Lain-lain senilai Rp29.517 dan transaksi antar entitas senilai Rp327.179.951.696, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp150.127.328.403.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember TA 2024		% Realisasi thd Anggaran	31 Desember TA 2023
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	70.000.000	1.127.807.020	1611,15	179.136.610
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>70.000.000</b>	<b>1.127.807.020</b>	<b>1611,15</b>	<b>179.136.610</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
<b>Belanja</b>					
Belanja Pegawai	B.3	79.934.794.000	76.870.781.869		66.723.606.383
Belanja Barang	B.4	200.350.020.000	186.301.309.874		174.373.682.436
Belanja Modal	B.5	6.451.367.000	6.241.687.156		2.150.408.496
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>286.736.181.000</b>	<b>269.413.778.899</b>	<b>93,96</b>	<b>243.247.697.315</b>

Jakarta, 07 Mei 2025  
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

Nama Perkiraan	Catatan	Jumlah	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>Aset</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	176.069.674	425.456.798
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	247.348.852	112.406.778
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3	1.713.356.095	322.880.682
Piutang Bukan Pajak	C.4	33.960.000	165.663.300
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.5	(169.800)	(828.317)
<b>Piutang Bukan Pajak (Netto)</b>	C.6	<b>33.790.200</b>	<b>164.834.983</b>
Persediaan	C.7	322.959.788	528.859.588
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>2.493.524.609</b>	<b>1.554.438.829</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Peralatan dan Mesin	C.8	95.078.561.272	89.546.792.007
Gedung dan Bangunan	C.9	157.293.492.299	156.215.129.835
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.10	144.386.000	144.386.000
Aset Tetap Lainnya	C.11	4.788.551.663	2.580.299.632
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.12	98.560.000	98.560.000
Akumulasi Penyusutan	C.13	(110.322.448.946)	(100.374.428.145)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>147.081.102.288</b>	<b>148.210.739.329</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.14	3.501.599.293	4.324.975.793
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.15	7.872.533.489	3.277.806.321
Aset Lain-lain	C.16	4.275.423.940	9.406.528.013
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.17	(6.534.280.848)	(11.647.231.690)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>9.115.275.874</b>	<b>5.362.078.437</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>158.689.902.771</b>	<b>155.127.256.595</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.18	8.144.289.042	3.573.467.610
Uang Muka dari KPPN	C.19	176.069.674	425.456.798
Utang jangka Pendek Lainnya	C.20	242.215.652	61.406.778
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>8.562.574.368</b>	<b>4.060.331.186</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>8.562.574.368</b>	<b>4.060.331.186</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.21	150.127.328.403	151.066.925.409
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>150.127.328.403</b>	<b>151.066.925.409</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>158.689.902.771</b>	<b>155.127.256.595</b>

Jakarta, 07 Mei 2025  
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia,



### III. LAPORAN OPERASIONAL

## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	9
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	9
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	77.016.658.249	66.713.211.693
Beban Persediaan	D.3	1.739.628.061	1.884.175.583
Beban Barang dan Jasa	D.4	166.139.416.297	95.644.073.924
Beban Pemeliharaan	D.5	5.957.183.337	7.512.757.935
Beban Perjalanan Dinas	D.6	67.225.210.708	71.374.198.070
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	60.424.000
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	10.969.174.490	10.337.400.021
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	828.317
Beban Lain-lain	D.11	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>329.047.271.142</b>	<b>253.527.069.543</b>
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(329.047.271.142)	(253.527.069.534)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset	D.12	326.025.000	-
Beban Pelepasan Aset		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		659.183.431	189.317.401
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		55.287.750	30.796.812
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>929.920.681</b>	<b>158.520.589</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(328.117.350.461)</b>	<b>(253.368.548.945)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNB	D.13	-	-
Beban Perjalanan		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(328.117.350.461)</b>	<b>(253.368.548.945)</b>

Jakarta, 07 Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Pratikno

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	151.066.925.409	158.492.415.800
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	E.2	(328.117.350.461)	(253.368.548.945)
<b>DAMPAK KUMULATIF KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	E.3	-	-
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS*)</b>	E.4	(2.198.241)	30.113.533
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	(2.227.758)	23.809.500
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	29.517	6.304.033
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.6	-	-
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.5	327.179.951.696	245.912.945.021
DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN		268.820.657.983	242.998.904.315
DITERIMA DARI ENTITAS LAIN		(1.127.807.020)	(179.136.610)
TRANSFER KELUAR		(1.418.386.863)	(259.960.780)
TRANSFER MASUK		40.000.000	-
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG		60.969.504.680	3.353.138.096
PENGESAHAN PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUNG		(104.017.084)	-
<b>KENAIKAN / PENURUNAN ENTITAS</b>		(939.597.006)	(7.425.490.391)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>150.127.328.403</b>	<b>151.066.925.409</b>

Jakarta, 07 Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,



*Pratikno*  
**Pratikno**

### A. PENJELASAN UMUM

*Profil dan  
Kebijakan  
Teknis*

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Sedangkan fungsinya sendiri adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
4. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet.
5. Penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud.
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkomitmen dengan visi ***“Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”***.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
3. Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas.
4. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Kemenko Bidang PMK.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri dari 6 Deputi dan 1 Setmenko yaitu:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator  
Sekretariat yang bertanggungjawab berkenaan dengan administrasi dan Kantor Kementerian Koordinator Bidang PMK.
2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
3. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana
4. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan
5. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
6. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olah Raga
7. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Satuan Kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) adalah salah satu satuan kerja di Kemenko Bidang PMK. DJSN berfungsi sebagai Perumus Kebijakan Umum dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tugas DJSN adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial;
2. Mengusulkan kebijakan investasi dana Jaminan Sosial nasional; dan
3. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.

DJSN juga berwenang melakukan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.

Satuan Kerja Revolusi Mental adalah juga merupakan salah satu satuan kerja yang ada di Kemenko Bidang PMK. Sekretariat Revolusi Mental berfungsi menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, urusan administrasi umum, pengelolaan data dan informasi serta fasilitasi hubungan antar instansi pemerintah, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Revolusi Mental.

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam Rancangan RPJM Tahap ke-3 serta menyelaraskan arah kebijakan dan strategi nasional dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka koordinasi dilaksanakan untuk upaya Pembangunan Manusia Indonesia melalui tujuan:

### **1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan**

Terhadap tujuan tersebut sasaran strategisnya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap kinerja Kemenko Bidang PMK dalam menjalankan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dapat berdampak terhadap peningkatan program-program penanggulangan kemiskinan khususnya upaya-upaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta pelayanan-pelayanan dasar masyarakat Indonesia.
- b. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap kinerja Kemenko Bidang PMK dalam

menjalankan fungsi KSP di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dapat berdampak terhadap peningkatan program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan, pemuda, serta kelompok-kelompok marginal di Indonesia.

- c. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong.

## **2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel**

Terhadap tujuan tersebut sasaran strategisnya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko Bidang PMK; dan
- b. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko Bidang PMK.

Ketercapaian kedua sasaran strategis tersebut diindikasikan pada meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) terhadap laporan keuangan sebagai hasil pengelolaan keuangan oleh Kemenko Bidang PMK, dan meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

*Pengungkapan  
Anggaran,  
Realisasi  
Anggaran,  
Target dan  
Realisasi  
Output  
Prioritas  
Nasional  
Tahun 2024*

### **Pengungkapan Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output Prioritas Nasional Tahun 2024**

Sejak diterapkannya Redesain Sistem Perencanaan Program dan Penganggaran (RSPP) pada tahun 2021, Nomenklatur Kegiatan yang semula pada tingkat Eselon II, berubah menjadi tingkat Eselon I. Sedangkan untuk Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional berubah menjadi Rincian Output (RO) Prioritas Nasional. Berikut struktur RSPP untuk RO Prioritas Nasional tahun 2024:

*Tabel 1*  
*Struktur RSPP untuk Rincian Output Prioritas Nasional Tahun 2024*

<b>Kegiatan</b>	<b>Klasifikasi Rincian Output (KRO)</b>	<b>Rincian Output (RO)</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>
6341 - Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	PBH - Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	001 - Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Revolusi Mental	3	Rekomendasi kebijakan
	QDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	001 - Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	76	Lembaga
		002 - Penguatan Pusat perubahan di tingkat daerah	34	Lembaga
	QMB - Komunikasi Publik	001 - Perluasan Diseminasi GNRM pada Masyarakat	1	layanan
6337 - Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	PBN - Kebijakan Bidang Sosial	001 - Kajian dan Telaahan Penyelenggaraan SJSN	9	Rekomendasi Kebijakan

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Kemenko Bidang PMK, memiliki dua kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional yaitu:

- a. Kegiatan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional mendukung Prioritas Nasional (PN 3) yakni Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, Khususnya pada Program Prioritas (PP 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, Kegiatan Prioritas (KP 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Proyek Prioritas (Prop 2) Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

**Tabel 2**  
**Matriks Kertas Kerja Pencapaian Sasaran PN-PP-KP-ProP Tahun 2024**  
**Dewan Jaminan Sosial Nasional**

NOMEN KLATUR PN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	PERSENSE CAPAIAN	KETERANGAN
	STRATEGIS/SASARAN	PROGRAM/SASARAN KEGIATAN					
Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	2	Meningkatkannya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial (%)	98%	4.630.837.371 (dari 5.701.602.000)	98,45%	Sumber: Peserta JKN s.d. Desember2024 sebesar 278.096.343 (Sumber: LPP BPJS Kesehatan) Jumlah penduduk s.d. Semester I 2024 sebesar 282.477.584 (Sumber: Dukcapil)
	Program Prioritas 2: Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	1	Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98%	98,45%
			Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan: Pekerja Formal	74,57%		58,09%	Peserta Jamsosnaker segmen PPU dan Jakon s.d. Desember 2024 sebesar 35.325.338 (Sumber: LPP BPJS Ketenagakerjaan) Jumlah semesta pekerja formal sebesar 60.815.798 (Sumber: Sakernas Agustus 2024)
			Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan: Pekerja Informal	25,94%		11,81%	Peserta Jamsosnaker segmen BPU s.d. Desember 2024 sebesar 9.899.338 (Sumber: LPP BPJS Ketenagakerjaan) Jumlah semesta pekerja informal sebesar 83.826.206 (Sumber: Sakernas Agustus 2024)
Kegiatan Prioritas 02 : Sistem Jaminan Sosial Nasional	1	Terwujudnya sistem jaminan sosial nasional	Jumlah kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundangan terkait jaminan sosial	2 Dokumen		2 Dokumen	Rekomendasi Kebijakan
MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98%		98,45%	Sumber: Peserta JKN s.d. Desember 2024 sebesar 278.096.343 (Sumber: LPP BPJS Kesehatan) Jumlah penduduk s.d. Semester I 2024 sebesar 282.477.584 (Sumber: Dukcapil)
Pro-P 02: Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional	2	Terlaksananya penguatan penyelenggaraan SJSN berbasis data	Jumlah monitoring dan evaluasi terpadu jaminan sosial bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan berbasis digital	1 Sistem		1 Sistem Informasi, pengembangan sismonev DJSN (sismonev.djsn.go.id)	<a href="https://kesehatan.djsn.go.id">https://kesehatan.djsn.go.id</a>

**1. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (Proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial)**

a) Narasi Capaian

Selaras dengan RKP 2024, target capaian kinerja PN 3 dalam peningkatan kepesertaan/cakupan perlindungan sosial sebesar 98%, menurut sistem monitoring dan evaluasi DJSN (<https://kesehatan.djsn.go.id>) cakupan kepesertaan JKN per Desember 2024 telah mencapai target yang ditentukan yakni 98%.

b) Upaya Yang Dilakukan Mencapai Kinerja

DJSN berkoordinasi dengan K/L terkait seperti Kemenkes, Kemnaker, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dll dalam melakukan kolaborasi penyelenggaraan SJSN khususnya dari sisi kebijakan untuk mengupayakan yang terbaik dalam melayani dan meningkatkan optimalisasi pelayanan dan fasilitas kesehatan. Selain itu, sosialisasi terus dilakukan ke beberapa daerah dalam menyelenggarakan SJSN, serta meningkatkan layanan berbasis digital dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan SJSN khususnya dalam meningkatkan cakupan kepesertaan JKN.

c) Kendala Dalam Mencapai Kinerja

- Terbatasnya anggaran menjadi salah satu hal krusial bagi DJSN dalam melakukan penyelenggaraan SJSN
- Kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi sosial (JKN) masih belum tinggi

**2. PP 2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (a. Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; b. Persentase cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan: Pekerja Formal; c. Persentase cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan: Pekerja Informal)**

a) Narasi Capaian

• Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Selaras dengan RKP 2024, target capaian kinerja PN 3 dalam peningkatan kepesertaan/cakupan perlindungan sosial sebesar 98%, menurut sistem monitoring dan evaluasi DJSN (<https://kesehatan.djsn.go.id>) cakupan kepesertaan JKN per Desember 2024 telah mencapai target yang ditentukan yakni 98%.

• Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Formal)

Pada RKP tahun 2024, target cakupan kepesertaan jamsos naker sebesar 74,57%, namun sampai Desember 2024 capaian belum melewati target

yang ditentukan yakni sebesar 58,09%, dimana hasil ini merupakan perhitungan jumlah kepesertaan aktif PPU per Desember 2024.

- Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Informal)

Pada RKP tahun 2024, target cakupan kepesertaan jamsos naker sebesar 25.94%, namun pada triwulan IV capaian belum melewati target yang ditentukan yakni sebesar 11,81%, dimana hasil ini merupakan perhitungan jumlah kepesertaan aktif BPU dan Jasa Konstruksi per Desember 2024.

b) Upaya Yang Dilakukan Mencapai Kinerja

Dalam hal ini DJSN melakukan koordinasi untuk meningkatkan cakupan kepesertaan baik dari kesehatan dan atau ketenagakerjaan. Untuk kepesertaan JKN, DJSN terus melakukan upaya salah satunya ialah optimalisasi agen penggerak jaminan sosial yang berjalan sedang proses penyusunan RSKKNI untuk menjadi wadah dalam koordinasi dengan agen yang sudah terbentuk sebelumnya seperti Kader JKN dan Perisai, dari sisi Ketenagakerjaan, DJSN melakukan upaya sinkronisasi kebijakan terkait PBI Jamsosnaker, PP 49/2023 tentang JKK JKM, Permenaker 2 tahun 2022 tentang JHT, PP 37/2021 tentang JKP, PP 45/2015 tentang JP

c) Kendala Dalam Mencapai Kinerja

- Terbatasnya anggaran menjadi salah satu hal krusial bagi DJSN dalam melakukan penyelenggaraan SJSN.
- Salah satu hal paling signifikan penyebab tercapainya target cakupan BPJS Ketenagakerjaan baik dari Informal dan Formal adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi sosial baik dari sisi JKN atau Ketenagakerjaan masih rendah.

### **3. KP 2 Sistem Jaminan Sosial Nasional (Jumlah kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundangan terkait jaminan sosial)**

a) Narasi Capaian

Selaras dengan RKP 2024 Lampiran II, target Jumlah Kajian Penguatan dan Harmonisasi Peraturan Perundangan Terkait Jaminan Sosial sebesar 2 dokumen. Sampai dengan Desember 2024, telah terlaksana capaian dokumen sejumlah 2 seperti rincian sebagaimana terlampir:

- Rekomendasi Kebijakan Penguatan Dan Harmonisasi POUU Terkait Transformasi Program dan Kelembagaan, Serta SOTK dan Hak Keuangan DJSN
- Rekomendasi Kebijakan Penguatan dan Harmonisasi POUU Terkait

## Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

### b) Upaya Yang Dilakukan Mencapai Kinerja

Pada tahun 2023 dan 2024, DJSN mendapatkan mandat pada Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, dalam hal ini DJSN sebagai penanggung jawab perlu menyusun kajian-kajian yang mendukung capaian pada Rekomendasi Kebijakan.

### c) Kendala Dalam Mencapai Kinerja

- Terbatasnya anggaran menjadi salah satu hal krusial bagi DJSN dalam melakukan penyelenggaraan SJSN dan perlu melakukan koordinasi dengan K/L lainnya dalam menyusun kajian-kajian di dalamnya.
- Sekitar 40 kajian pada Perpres 36/2023 DJSN sebagai penanggung jawab dan 58 kajian sebagai K/L terkait.

## **4. ProP 2 Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional**

### a) Narasi Capaian

Dalam melaksanakan penguatan penyelenggaraan SJSN berbasis data dan digital, DJSN telah melakukan pengembangan pada sistem monitoring dan evaluasi DJSN (<https://kesehatan.djsn.go.id>), pengembangan ini juga didukung dengan adanya salah satu instrumen keuangan World Bank khususnya pada DLI.8.1 DJSN perlu melakukan pengembangan Sistem Informasi dalam mendukung digitalisasi di ruang lingkup jaminan sosial nasional. Pengembangan sistem informasi tersebut dilakukan dari tahap perencanaan terlebih dahulu, yang selanjutnya dilakukan tindak lanjut implementasi pengembangan sistem pada tahap pelaksanaan dan diakhiri dengan tahap pelaporan dengan mengembangkan beberapa kriteria, sebagai berikut:

- Cakupan (keseluruhan dan per kelompok dan kelas)
- Kepesertaan aktif (keseluruhan dan per kelompok dan kelas)
- Jaringan penyelenggara (keseluruhan dan per jenis fasilitas, publik/swasta, status akreditasi)
- Rasio penerima manfaat terhadap penyedia FKTP (keseluruhan dan per tipe fasilitas, publik/swasta)
- Data pemanfaatan (keseluruhan dan rawat jalan/inap, tipe fasilitas, publik/swasta, kelompok keanggotaan, jenis kelamin)
- 20 diagnosis teratas (keseluruhan dan per rawat jalan/inap, tipe fasilitas, publik/swasta, gender)

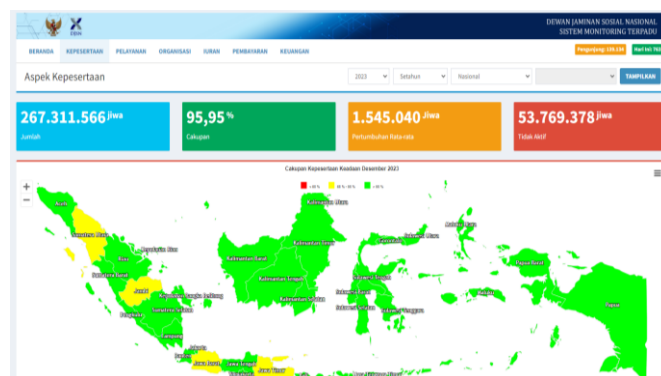
- Top 10 prosedur (keseluruhan dan rawat jalan/inap, tipe fasilitas, publik/swasta, gender)
- Pendapatan (keseluruhan dan menurut kelompok keanggotaan dan kelas)
- Data pengeluaran (keseluruhan dan rawat jalan/rawat inap, kapitasi/non kapitasi/inacbg, jenis fasilitas, publik/swasta, kelompok keanggotaan, jenis kelamin)
- Rasio klaim (keseluruhan dan per kelompok keanggotaan dan kelas)
- % Klaim yang ditolak (keseluruhan dan dengan alasan (mis. tidak lengkap, eror, pembelanjaan tidak memenuhi syarat, penyalahgunaan) oleh FKRTL)

## Dokumentasi SISMONEV DJSN 2024

### SISMONEV DJSN 2024



#### Kesehatan



#### Ketenagakerjaan



b) Upaya Yang Dilakukan Mencapai Kinerja

DJSN melakukan koordinasi dengan beberapa K/L dalam pengembangan SISMONEV DJSN baik dengan cara *benchmarking* atau kunjungan. Pengembangan juga dilakukan bekerja sama dengan PDN (Pusat Data Nasional) guna memaksimalkan dukungan proteksi pada sistem pemerintahan

c) Kendala Dalam Mencapai Kinerja

- Kompleksitas pemenuhan syarat dalam berkoordinasi dengan K/L lain untuk pengembangan sistem informasi SISMONEV DJSN
- Proses birokrasi yang memerlukan jangka waktu yang panjang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan koordinasi

**5. MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial (Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional)**

a) Narasi Capaian

Selaras dengan RKP 2024, target capaian kinerja PN 3 dalam peningkatan kepesertaan/cakupan perlindungan sosial sebesar 98%, menurut sistem monitoring dan evaluasi DJSN (<https://kesehatan.djsn.go.id>) cakupan kepesertaan JKN per Desember 2024 telah mencapai target yang ditentukan yakni 98%.

b) Upaya Yang Dilakukan Mencapai Kinerja

DJSN terus melakukan penyelenggaraan SJSN sambil berkoordinasi dengan K/L terkait untuk mengoptimalkan kualitas pencapaian kinerja penyelenggaraan program jaminan sosial, peningkatan cakupan kepesertaan JKN terus meningkat dari tahun 2021 86,7%, 2022 89,82%, 2023 95,95% dan per Desember 2024 sebesar 98,45%

c) Kendala Dalam Mencapai Kinerja

- Terbatasnya anggaran menjadi salah satu hal krusial bagi DJSN dalam melakukan penyelenggaraan SJSN
- Kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi sosial (JKN) masih belum tinggi

- b. Kegiatan Revolusi Mental mendukung Prioritas Nasional (PN 4) yakni Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Khususnya pada Program Prioritas (PP 1) Penguatan Gugus Tugas Nasional Revolusi, 2) Penguatan Pusat Perubahan di Tingkat Daerah, 3) Perluasan Diseminasi GNRM pada Masyarakat, dan 4) Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Revolusi Mental.

Program Penguatan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental dilakukan dengan mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental, capaian sampai dengan Desember 2024 telah terbentuk di 494 Kab/Kota dan 35 Provinsi. Daerah yang belum membentuk 3 Provinsi dan 20 Kab/Kota, hampir seluruhnya dari wilayah DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua.

Selanjutnya, program Penguatan Pusat Perubahan di Tingkat Daerah dilakukan dengan berkolaborasi dengan Organisasi dan Kelompok Masyarakat. Sampai dengan bulan Desember telah ditandatangani perjanjian kerja sama dengan 9 Ormas/Pokmas. Diantaranya, PP Muhammadiyah, PB Nahdathul Ulama, PGRI, IBEKA (Inisiatif Bisnis Ekonomi Kerakyatan), PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia), KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia), PHDI (Parisadha Hindhu Dharma Indonesia), Matakin (Majelis Tinggi Khonghucu Indonesia), Permabudhi (Persatuan Umat Budha Indonesia).

Pada program Perluasan Diseminasi GNRM pada Masyarakat dilakukan penyebarluasan nilai strategis instrumental revolusi mental melalui kabar praktik baik di masyarakat, dikemas dengan konten-konten menarik yang diterbitkan pada kanal media revolusi mental. Selain itu diseminasi ini juga melibatkan kolaborasi dengan para pokmas, ormas, pemda, dan influencer pegiat media,

Terakhir, untuk penyusunan Rekomendasi Alternatif Kebijakan tahun 2024 diambil 3 Kegiatan Prioritas(KP) pada Prioritas Nasional (PN) 4 RPJMN 2020-2024. Diantaranya, KP4 Penguatan Pusat Perubahan Revolusi Mental, KP5 Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan, dan KP6 Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewargaan, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara.

Berikut Pagu, Realisasi Anggaran, Target Capaian Output Strategis, dan Capaian Output Strategis Program Prioritas Nasional dari Satuan Kerja Revolusi Mental:

**Tabel 3**  
**Pagu, Realisasi Anggaran, Target Capaian Output Strategis, dan Capaian Output Strategis Program Prioritas Nasional dari Satuan Kerja Revolusi Mental Tahun 2024**

Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu (Setelah Realokasi)	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Revolusi Mental	Prioritas Nasional:							
	1 Penguatan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	7.431.145.000	6.920.563.705	93,13	Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga	100,00
	2 Penguatan Pusat Perubahan di Tingkat Daerah	9.043.895.000	9.005.928.614	99,58	Lembaga	34 Lembaga	34 Lembaga	100,00
	3 Perluasan Diseminasi GNRM pada Masyarakat	4.493.505.000	4.266.101.570	94,94	Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100,00
	4 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Revolusi Mental	1.529.732.000	1.457.705.346	95,29	Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	100,00

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Per 31 Desember Tahun 2024 ini juga merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan seperti satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah 8 satker yang mana seluruh satker tersebut menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA**

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	36	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya dan Prestasi Olahraga (419372)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	36	Sekretariat Kemenko Bidang PMK (427768)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	36	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial (427769)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	36	Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana (427770)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5	36	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan (427771)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6	36	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda (427772)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
7	36	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	1	-	-	-	-	-	-	-	1
8	36	Sekretariat DJSN (427785)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah			8	-	-	-	-	-	-	-	8

Keterangan:

KP : Kantor Pusat  
 KD : Kantor Daerah  
 DK : Dekonsentrasi  
 TP : Tugas Pembantuan  
 M : Menyampaikan  
 TM : Tidak Menyampaikan

SAI yang digunakan sekarang adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang menggantikan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN) pada tahun 2022. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu SAKTI juga menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

**Basis Akuntansi**

### **A.3. Basis Akuntansi**

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menerapkan pertama kali Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mulai tahun 2015. Penerapan SAP Berbasis Akrual tersebut sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun 2024 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

#### **1. Pendapatan- LRA**

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah.

- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

## **2. Pendapatan- LO**

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Secara khusus dapat diinformasikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bukanlah Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi/rencana PNBPN dalam DIPAnya. Namun demikian dalam kegiatan operasional sehari-hari masih dimungkinkan terdapat realisasi PNBPN yang berasal dari Kegiatan Non Operasional diantaranya dan tidak terbatas pada:
  - 1) penerimaan kembali belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu (TAYL) yang merupakan kelebihan pembayaran akun 51 (belanja pegawai) kepada pegawai;
  - 2) penerimaan Kembali belanja barang, belanja modal dan/atau belanja lainnya (TAYL) yang merupakan setoran pengembalian belanja ke Kas Negara dalam rangka tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI; dan
  - 3) pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah oleh rekanan (pihak ketiga).
  - 4) Pendapatan dari pelepasan aset non lancar.
- d. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- e. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

## **3. Belanja**

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

#### **4. Beban**

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam CaLK.

*Aset*

#### **5. Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

##### **Aset Lancar**

- a. Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- c. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - 2) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- d. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- e. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar

TPA/TGR.

- f. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah yang dibuktikan dengan tanda terima.
- g. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - 1) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **Aset Tetap**

- a. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- b. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- c. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); dan
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- d. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- e. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

### **Piutang Jangka Panjang**

- a. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- b. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- c. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- d. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset  
Lainnya*

### **Aset Lainnya**

- a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- b. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- c. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

*Kewajiban*

### **6. Kewajiban**

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### **1) Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan

untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

## 2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## Ekuitas

### 7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## Penyisihan Piutang Tak Tertagih

### 8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- b. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 5  
Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan Aset Tetap*

**9. Penyusutan Aset Tetap**

- a. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - 1) Tanah
  - 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- e. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 6  
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

## 10. Amortisasi Aset Tak Berwujud

- a. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- b. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 7  
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- c. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## 11. Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran

Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan

lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang / jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Secara garis besar proses bisnis RPATA dapat dikelompokkan menjadi:

#### 1. Pengisian RPATA

Pengisian RPATA dilakukan melalui pembuatan dan penyampaian SPP Penampungan dengan menghitung sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan, diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan akhir tahun anggaran yang menjadi dasar perhitungan pembayaran.

Sisa pekerjaan di akhir tahun yang dimaksud termasuk porsi pekerjaan pemeliharaan. Dikecualikan dari mekanisme RPATA adalah pekerjaan dari kontrak yang dibiayai dari pendapatan BLU.

#### 2. Pembayaran Kepada Penyedia

Dalam rangka menjaga prinsip pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima, pencairan dana dari RPATA untuk dipindahbukukan ke rekening Penyedia dilakukan pada saat Penyedia berhak menerima pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan, melalui pengajuan SPP/SPM-Pembayaran. Pembayaran kepada Penyedia dilakukan pada saat:

- a. pekerjaan terselesaikan 100%;
- b. masa penyelesaian pekerjaan di kontrak berakhir; atau
- c. masa pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir.

Pengajuan SPP/SPM-Pembayaran hanya dilakukan dalam 1 kesempatan.

Terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan di tanggal 31 Desember 2024 namun dilanjutkan penyelesaiannya ke TA berikutnya paling lama 90 hari kalender, maka prestasi yang telah dicapai s.d. tanggal 31 Desember 2024 belum dapat diajukan pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran atas pekerjaan tersebut, dilakukan secara sekaligus pada saat batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan telah berakhir.

#### 3. Penihilan RPATA atas Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan

Satker melakukan penelitian atas sisa dana yang ada di RPATA untuk disetor kembali ke RKUN/Rekening lainnya milik BUN, dalam hal terdapat sisa dana atas pekerjaan yang tidak terselesaikan, melalui pembuatan dan pengajuan SPP, SPM, SP2D Penihilan.

#### 4. Penyelesaian Pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya

Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun

anggaran berikutnya paling lama 90 hari kalender. Pemberian kesempatan tersebut paling banyak diberikan 2 kali, dengan akumulasi pemberian kesempatan tidak boleh melebihi 90 hari kalender.

Pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) diatur dalam Petunjuk Teknis Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kemenko Bidang PMK selama Tahun Anggaran 2024 didanai dari berbagai sumber pembiayaan. Sumber -sumber pembiayaan tersebut meliputi:

1. Rupiah Murni (RM). Merupakan sumber pembiayaan utama yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Hibah Langsung Luar Negeri (LN). Kemenko Bidang PMK juga menerima dukungan pembiayaan dalam bentuk hibah langsung yang berasal dari luar negeri, yang terdiri dari:
  - Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk Uang. Hibah ini adalah hibah dari UNICEF nama program *Programme Document Coordinating Ministry for Human Development and Culture and UNICEF August 2022 – December 2025* sebesar Rp593.120.916 yang dipertanggungjawabkan pada Satker Setkemenko Bidang PMK.
  - Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk Jasa. Hibah ini terdiri dari:
    - a. Hibah dari *Friedrich Ebert Stiftung* (FES) nama Program Pembangunan Manusia untuk Mempercepat Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebesar Rp4.996.221.082 yang dipertanggungjawabkan pada Satker Setkemenko Bidang PMK, Satker Deputi 1, Satker Deputi 2, Satker Deputi 3, Satker Deputi 4, dan Satker Deputi 5.
    - b. Hibah dari *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) nama Program PROAKTIF (Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang Komprehensif, Inklusif, dan Adaptif) sebesar Rp49.018.843.224 yang dipertanggungjawabkan pada Satker Setkemenko Bidang PMK.
    - c. Hibah dari *Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH* nama program *Technical and Vocational Education Training (TVET) System Reform* sebesar

Rp2.138.416.178 yang dipertanggungjawabkan pada Satker Deputi 6.

- d. Hibah dari Kamar Dagang dan Industri Trier Jerman (IHK Trier) nama program Implementasi Program Kemitraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia sebesar Rp1.252.696.000 yang dipertanggungjawabkan pada Satker Deputi 6.
  - e. Hibah dari *Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH* nama program *Migrasi dan Diaspora* sebesar Rp2.386.470.695 yang dipertanggungjawabkan pada Satker Sekretariat DJSN.
    - Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk Barang. Hibah ini merupakan hibah dari *Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH* nama program *Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH* sebesar Rp524.550.500.
3. Pinjaman Luar Negeri. Pinjaman Luar Negeri yang diterima oleh Kemenko Bidang PMK selama Tahun Anggaran 2024 dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama berdasarkan mekanisme pengelolaan dan penyalurannya:
- Pinjaman Luar Negeri Langsung (*Direct Loan*) yang Tercatat dalam DIPA.
  - Pinjaman Luar Negeri Tidak Langsung (*Indirect Loan*), yaitu Skema Program for Results Financing (PforR).

Pada tahun 2024, delapan Satker di Kemenko Bidang PMK melakukan revisi anggaran sebanyak sebagai berikut:

*Tabel 8*  
*Daftar Revisi Anggaran per Satker Tahun 2024*

Kode Satker	Nama SatKer	Jumlah Revisi
419372	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, pemajuan Budaya, dan Prestasi Olah Raga	12
427768	Sekretariat Kemenko Bidang PMK	18
427769	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	13
427770	Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	11
427771	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	10
427772	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	10
427773	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	9
427785	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	11

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

*Tabel 9  
Anggaran Awal dan Setelah Revisi Tahun 2024*

Uraian	31 Desember TA 2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Perpajakan	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	70.000.000	70.000.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	73.369.475.000	79.934.794.000
Belanja Barang	183.448.585.000	200.350.020.000
Belanja Modal	2.175.000.000	6.451.367.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>258.993.060.000</b>	<b>286.736.181.000</b>

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp1.127.807.020*

## **B.1 PENDAPATAN**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.127.807.020 atau mencapai 1611 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp70.000.000. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai berikut:

*Tabel 10  
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP / TGR Pensiunan	-	29.922.218	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	70.000.000	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	326.025.000	-
Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	231.134.080	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	23.261.955	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	517.463.767	-
<b>Jumlah</b>	<b>70.000.000</b>	<b>1.127.807.020</b>	<b>1.611,15</b>

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember TA 2024 melebihi estimasi pendapatan pada periode yang berkenaan. Realisasi Pendapatan berasal dari:

- a. Pendapatan setoran dari sisa utang Non TP/TGR Pensiunan sebesar Rp29.922.218. Pendapatan ini merupakan penerimaan kas yang berasal dari penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran manfaat kepada pensiunan.
- b. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp326.025.000. Pendapatan ini merupakan hasil pelaksanaan Lelang melalui aplikasi lelang pada tanggal 18 September tahun 2024. Pada lelang tersebut terdapat tiga unit mobil yang terjual dari lima unit yang dilelang dengan nilai barang yang terjual sebesar Rp326.025.000. Rincian mobil yang dilelang adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Harga Lelang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan
1	Nissan Teana XV B 1149 PQB	Rp108.675.000	Rp522.966.000	Rp522.966.000
2	Nissan Teana XV B 1142 PQB	Rp103.500.000	Rp522.966.000	Rp522.966.000
3	Nissa Teana XV B 1141 PQB	Rp113.850.000	Rp522.966.000	Rp522.966.000
	<b>Total</b>	<b>Rp326.025.000</b>	<b>Rp1.568.898.000</b>	<b>Rp1.568.898.000</b>

- c. Penerimaan dari Klaim Asuransi BMN sebesar Rp231.134.080. Penerimaan ini merupakan klaim atas kerusakan dinding ACP sisi selatan gedung Kemenko Bidang PMK akibat angin kencang hingga menyebabkan beberapa panel ACP terlepas dan menimpa gedung sekitar Kemenko Bidang PMK. Atas kejadian tersebut dilakukan klaim atas asuransi BMN kepada konsorsium Asuransi BMN melalui surat nomor 3075/ROUM.SDM/INV.03.02/20/2023 dan mendapat ganti rugi sebesar Rp231.134.080. Klaim tersebut disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- d. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp23.261.955, yang terdiri dari:
  1. Pembayaran piutang bukan pajak sebesar Rp23.259.800, dan
  2. Penerimaan yang merupakan pembulatan atas pembayaran belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp2.155.
- e. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp517.463.767 yang terdiri dari:
  1. Pembayaran piutang bukan pajak sebesar Rp108.433.500, dan
  2. Setoran pengembalian atas tindak lanjut temuan BPK RI TA 2023 sebesar Rp409.020.267.

**Tabel 11**  
*Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023*

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember TA 2024	Realisasi s.d 31 Desember TA 2023	Naik (Turun) % terhadap Desember 2023
Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	231.134.080	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	326.025.000	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	23.261.955	2.251.026	933,39
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	517.463.767	176.885.575	192,54
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP / TGR Pensiunan	29.922.218	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	9	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.127.807.020</b>	<b>179.136.610</b>	<b>529,58</b>

Realisasi Pendapatan TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 terdapat kenaikan sebesar 529,58 persen. Kenaikan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh besarnya nilai pengembalian ke kas negara sebagai tindak lanjut atas temuan BPK tahun 2023.

*Belanja*

*Rp269.413.778.899*

## **B.2. BELANJA**

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp269.413.778.899 atau 94% dari anggaran belanja sebesar Rp286.736.181.000. Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 10,76 persen dibandingkan 31 Desember TA 2023. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember TA 2024 tersaji sebagai berikut:

**Tabel 12**  
*Perbandingan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023*

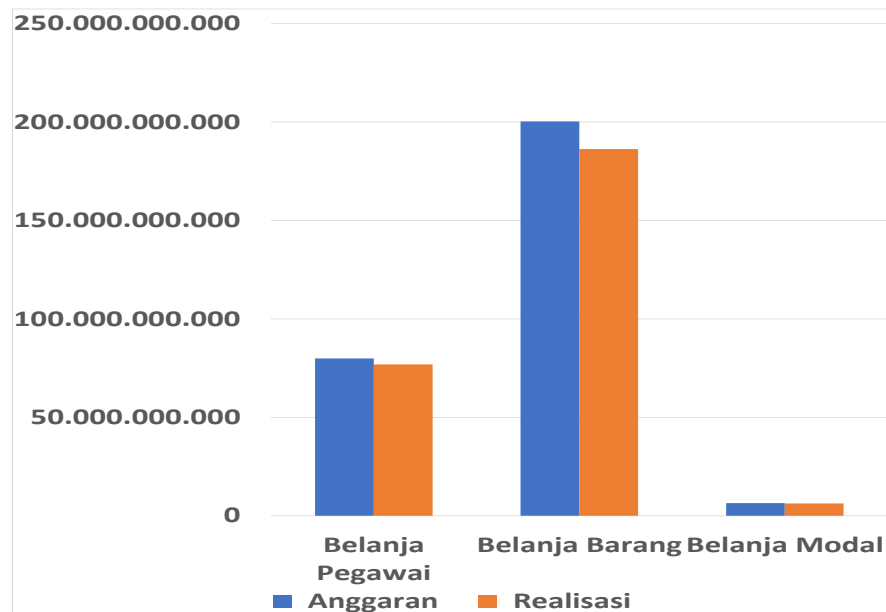
Uraian	Realisasi untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 31 Desember TA 2024	Realisasi untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 31 Desember TA 2023	Naik (Turun) % terhadap 31 Desember 2023
Belanja Pegawai	76.870.781.869	66.723.606.383	15,21
Belanja Barang	186.301.309.874	174.373.682.436	6,84
Belanja Modal	6.241.687.156	2.150.408.496	190,26
<b>Jumlah</b>	<b>269.413.778.899</b>	<b>243.247.697.315</b>	<b>10,76</b>

**Tabel 13**  
*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember TA 2024*

Uraian	31 Desember TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	79.934.794.000	76.885.212.854	96,18
Belanja Barang	200.350.020.000	186.336.099.886	93,01
Belanja Modal	6.451.367.000	6.241.687.156	96,75
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>286.736.181.000</b>	<b>269.462.999.896</b>	<b>93,98</b>
Pengembalian Belanja	-	(49.220.997)	-
<b>Total Belanja</b>	<b>286.736.181.000</b>	<b>269.413.778.899</b>	<b>93,96</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

**Diagram 1**  
*Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember TA 2024*



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 14**  
*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per Program untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember TA 2024*

Program	31 Desember TA 2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	84.863.404.000	75.378.195.908	88,82
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	201.872.777.000	194.035.582.991	96,12
<b>Total Belanja</b>	<b>286.736.181.000</b>	<b>269.413.778.899</b>	<b>93,96</b>

Sampai dengan 31 Desember Tahun 2024, capaian realisasi Kemenko Bidang PMK sebesar 93,96% lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai 99%. Hal ini disebabkan karena anggaran yang diblok atau *automatic adjustment* yang cukup besar yaitu senilai Rp9.209.595.000 dari total pagu sehingga menyebabkan persentase realisasi lebih kecil.

Dari akun belanja barang, terdapat pinjaman untuk Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dimana program tersebut merupakan program pemerintah dalam mendukung implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara struktur dikawal oleh beberapa kementerian dan lembaga dan didukung pendanaannya oleh Bank Dunia melalui mekanisme *loan* Bank Dunia nomor IBRD 8941-ID.

Untuk komponen 3 yang menjadi tanggungjawab Kemenko Bidang PMK, Bank Dunia telah setuju untuk mengalokasikan dana sebesar USD2.400.000 juta atau setara Rp.35.000.000.000 secara *multi-years* dengan pembagian alokasi tahun 2022 sebesar Rp.5.000.000.000, tahun 2023 sebesar Rp.10.000.000.000 dan tahun 2024 sebesar Rp.30.150.000.000. Pada tahun 2023, anggaran yang sudah ada di DIPA Kemenko Bidang PMK, c.q Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial sebesar Rp.10.000.000.000 yang secara garis besar dipergunakan untuk melakukan rapat koordinasi rutin, monitoring dan evaluasi, rekrutmen tenaga ahli, dan penyusunan instrumen untuk membentuk *National Coordination Platform* (NCP). Sisa atas pinjaman luar negeri, akan di *carrying* atau di akumulasi dengan pencairan pinjaman luar negeri tahun berikutnya. Selama ini sudah banyak data/platform masing-masing K/L, akan tetapi masih banyak permasalahan yang tersedia, seperti data yang kurang terpadu, instrumen yang tumpang tindih, dan data yang tidak dapat dilihat oleh masyarakat. Oleh karena itu, melalui P3PD, salah satu inisiasi Kemenko Bidang PMK yaitu untuk menyusun Dokumen Strategi Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Dokumen Strategi Pelaksanaan Undang-Undang Desa yang berkelanjutan memerlukan penyusunan berbagai strategi yang komprehensif. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah dan masyarakat desa dalam menjalankan undang-undang tersebut. Penting untuk mendorong upaya-upaya peningkatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat desa agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif. Dalam dokumen ini, terdapat lima pilar utama pelaksanaan UU Desa, yaitu pemerintahan desa dan penguatan kapasitas desa, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat,

pembinaan dan pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi desa, yang diintegrasikan secara holistik dalam dokumen strategi pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Dengan adanya dokumen strategi yang tersusun dengan baik, diharapkan pelaksanaan UU Desa dapat menjadi refleksi nasional yang nyata dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam percepatan pembangunan di daerah. Peningkatan kapasitas baik dalam pemerintahan desa maupun masyarakatnya, serta pembangunan yang terencana, akan membawa dampak positif dalam jangka panjang. Pemerintah dan masyarakat desa dapat bekerja sama dalam mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, desa-desa di Indonesia dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang tangguh, sekaligus meminimalkan kesenjangan antar wilayah di Indonesia.

Realisasi pinjaman ke Bank Dunia per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 15  
Realisasi pinjaman ke Bank Dunia per 31 Desember 2024*

No.	Uraian	Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Pinjaman dan Hibah				
	- Belanja Barang	2022	5.000.000.000	4.228.257.836	771.742.164
	- Belanja Barang	2023	10.000.000.000	9.997.599.270	2.400.730
	- Belanja Barang	2024	30.150.000.000	23.978.254.320	6.171.745.680
	<b>Jumlah</b>			<b>38.204.111.426</b>	<b>6.945.888.574</b>

Progress pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dan penjelasan realisasi anggaran pada Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sesuai amandemen loan P3PD, Kemenko Bidang PMK bertanggungjawab untuk menyusun dokumen strategi pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga output yang dihasilkan Kemenko Bidang PMK bersifat jangka panjang dan tidak terbatas pada jangka waktu pelaksanaan P3PD yang akan berakhir di tahun 2024. Penyusunan dokumen strategi pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Desa yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga secara garis besar dapat mengacu pada pilar-pilar Undang-Undang Desa. Keberadaan dokumen pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut dapat digunakan sebagai acuan dari semua Kementerian/Lembaga yang mempunyai kegiatan dengan lokus desa, baik

kegiatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi, pengembangan kawasan perdesaan yang ditargetkan selesai pada November 2024.

Pada triwulan II Tahun 2024, telah dilaksanakan proses rekrutmen empat (4) jasa konsultan perusahaan guna menyusun dokumen strategi pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Desa antara lain:

- 1) Penyusunan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dalam penyusunan rancangan rencana pengembangan jangka panjang pemberdayaan perempuan di desa pesisir Tahun 2025 - 2045. Perempuan di desa pesisir memainkan peran penting dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Perempuan terlibat dalam berbagai upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, seperti mencatat perempuan sebagai pelaku utama lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan pengelolaan bencana alam, dan membantu mencari alternatif mata pencaharian dan sumber pangan lain saat terjadi gangguan pertanian akibat perubahan iklim;
- 2) Kajian penyusunan strategi keberlanjutan program pembangunan dan pemberdayaan desa untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini sebagai penyiapan pengaturan kebijakan bagi peningkatan efektivitas pembangunan manusia berbasis siklus hidup di desa. Berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Kemenko Bidang PMK telah menerbitkan Dokumen Rencana Strategis, yang mana telah menetapkan fokus KSP (Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian) kepada Pembangunan Desa Semesta. Fokus KSP ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan yang memanfaatkan sumber daya di desa termasuk penggunaan dana desa;
- 3) Model pengembangan kawasan perdesaan lestari dan berkelanjutan. Kajian ini sebagai pelaksanaan P3PD untuk membantu desa-desa yang berada di satu kawasan dalam merumuskan kebutuhan perencanaan pembangunannya berdasarkan potensi dan kearifannya dengan tujuan untuk melakukan pendampingan terhadap seluruh entitas terkait di tingkat desa dan antar desa (aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa) dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif dengan menyertakan partisipasi dari seluruh pihak terkait, termasuk supra desa (kecamatan, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi) serta pemerintah pusat;

- 4) Penyusunan monitoring dan evaluasi akhir program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa (P3PD), kegiatan monitoring dan evaluasi akhir yang dilakukan di Komponen 3 ini akan menangkap isu-isu lintas komponen serta dinamika pelaksanaan P3PD secara keseluruhan. Monitoring dan evaluasi akhir program P3PD penting sebagai investasi dengan tujuan meningkatkan kapasitas aparat desa dan mendorong pembangunan partisipatif. Evaluasi ini memastikan manfaat program dapat dirasakan dan diukur, menjawab tujuan peningkatan kualitas belanja desa, serta menjadi pembelajaran untuk pengembangan dan replikasi lebih luas dan exit strategi.

Alasan untuk menggunakan perusahaan/pihak ketiga adalah agar memudahkan pengukuran output kinerja. Selain itu, secara individual, tenaga ahli yang berasal dari satu perusahaan mempunyai kredibilitas yang dapat diukur sehingga dapat memberikan saran dan rekomendasi terkait penyusunan perencanaan pembangunan desa, tata kelola keuangan desa, pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan kondisi di lapangan, pemanfaatan penggunaan teknologi informasi, dapat melakukan evaluasi terhadap kualitas dan akses layanan dasar di desa serta memberikan solusi untuk meningkatkannya. Alasan lainnya adalah azas efisiensi waktu dan biaya, dimana dengan menggunakan jasa perusahaan konsultan, pemerintah dapat menghemat waktu dan biaya dalam melakukan riset dan evaluasi, serta penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa.

Selain itu pada Triwulan IV Tahun 2024, juga telah dilaksanakan rapat koordinasi daerah di tiga regional, yaitu: regional Sumatera; regional Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Bali; serta regional Sulawesi. Rapat koordinasi diikuti oleh Kementerian/Lembaga terkait, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi, PMD Kabupaten; Regional Manajement Consultan (RMC); Tim Pendamping Profesional (TPP), Perwakilan Camat, dan Kepala Desa dari beberapa Kabupaten yang menjadi lokus P3PD. Tujuan pelaksanaan rapat koordinasi daerah untuk mengidentifikasi masalah, memperoleh praktek baik, internalisasi kebijakan berbagai Kementerian/Lembaga, serta untuk memperoleh masukan secara partisipatif dari berbagai pemangku kepentingan terhadap draf Strategi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Belanja Pegawai  
Rp76.870.781.869

### B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp76.870.781.869 dan Rp66.723.606.383 atau terjadi kenaikan sebesar 15,21 persen. Kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan gaji pegawai sebesar 8% berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024 yang berlaku mulai 1 Januari 2024, serta adanya kenaikan persentase tunjangan kinerja pegawai sesuai Perpres Nomor 102 Tahun 2024 yang berlaku mulai 30 September 2024. Belanja pegawai mengalami kenaikan terutama disebabkan oleh peningkatan pada:

1. Tunjangan suami/istri, anak, dan fungsional PNS, masing-masing naik sebesar 10,31%, 10,03%, dan 11,52%.
2. Tunjangan PPh PNS mengalami lonjakan sebesar 68,80%.
3. Di sisi lain, tunjangan umum PNS mengalami penurunan sebesar 30,00% akibat transformasi jabatan dari Fungsional Umum ke Fungsional Tertentu.
4. Selain itu, pengangkatan PPPK tahun 2024 juga berkontribusi terhadap kenaikan belanja gaji dan tunjangan terkait.

Tabel 16

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi s.d 31 Desember TA 2024	Realisasi s.d 31 Desember TA 2023	Naik / (Turun) % terhadap Realisasi 31 Desember 2023
Belanja Gaji Pokok PNS	20.220.076.100	19.174.986.900	5,45
Belanja Pembulatan Gaji PNS	294.893	306.319	(3,73)
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.378.532.650	1.249.701.720	10,31
Belanja Tunjangan Anak PNS	319.699.458	290.561.192	10,03
Belanja Tunjangan Struktural PNS	2.167.000.000	2.210.705.000	(1,98)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.459.602.000	2.205.482.000	11,52
Belanja Tunjangan PPh PNS	368.567.894	218.345.061	68,80
Belanja Tunjangan Beras PNS	947.688.120	956.523.360	(0,92)
Belanja Uang Makan PNS	2.183.797.000	2.300.750.000	(5,08)
Belanja Tunjangan Umum PNS	369.655.000	528.045.000	(30,00)
Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	262.500.000	325.000.000	(19,23)
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.198.376.200	284.889.500	320,65
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	19.088	3.629	425,99
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	52.697.040	11.345.840	364,46
Belanja Tunjangan Anak PPPK	13.390.176	2.877.096	365,41
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	188.510.000	45.115.000	317,84
Belanja Tunjangan Beras PPPK	54.749.520	13.542.540	304,28
Belanja Uang Makan PPPK	165.752.000	35.828.000	362,63
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	44.534.305.715	36.874.080.620	20,77
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>76.885.212.854</b>	<b>66.728.088.777</b>	<b>15,22</b>
Pengembalian Belanja	(14.430.985)	(4.482.394)	221,95
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>76.870.781.869</b>	<b>66.723.606.383</b>	<b>15,21</b>

#### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp186.301.309.874 dan Rp174.373.682.436. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 6,84 persen dari Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember TA 2023. Hal ini disebabkan, antara lain:

- a. Peningkatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar 200,46%. Peningkatan perjalanan dinas luar negeri yang cukup tinggi disebabkan oleh meningkatnya intensitas kerja sama internasional di bidang perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Kehadiran langsung menteri dalam forum internasional, konferensi multilateral, dan kunjungan bilateral juga menjadi penting untuk membahas isu-isu lintas negara seperti penanggulangan stunting, penguatan SDM, ketahanan kesehatan global dan pemberdayaan masyarakat, sehingga perjalanan dinas tersebut menjadi bagian dari upaya strategis Kemenko Bidang PMK.
- b. Peningkatan Belanja Sewa sebesar 125,34%. Peningkatan pada belanja ini karena mengakomodir keperluan operasional sewa kendaraan dan sewa gedung kantor untuk Kementerian baru yaitu Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Dari total realisasi Belanja Sewa sebesar Rp13.774.081.140, terdapat Belanja Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp1.713.356.095.
- c. Peningkatan Belanja Jasa Konsultan sebesar 79,49%. Peningkatan pada belanja ini disebabkan karena meningkatnya kegiatan operasional, adanya peningkatan belanja jasa konsultan pada kegiatan P3PD, serta adanya kebutuhan penyusunan dokumen rencana awal pada Kementerian Baru, yaitu Kemenko PM dan BP Taskin.

**Tabel 17**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi s.d 31 Desember TA 2024	Realisasi s.d 31 Desember TA 2023	Naik / (Turun) % terhadap 31 Desember TA 2023
<b>Belanja Barang Operasional</b>	<b>37.127.933.437</b>	<b>33.462.856.993</b>	<b>10,95</b>
Belanja Keperluan Perkantoran	29.348.001.158	25.268.527.192	16,14
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	152.561.840	186.420.000	(18,16)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	5.026.273.735	5.526.466.000	(9,05)
Belanja Barang Operasional Lainnya	2.601.096.704	2.387.447.126	8,95
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	93.996.675	-100
<b>Belanja Barang Non Operasional</b>	<b>17.673.278.721</b>	<b>17.849.954.436</b>	<b>(0,99)</b>
Belanja Bahan	14.057.755.986	13.224.858.997	6,30
Belanja Honor Output Kegiatan	2.015.598.000	2.794.358.000	(27,87)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.590.082.669	1.830.737.439	(13,15)
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	9.842.066	-	-
<b>Belanja Jasa</b>	<b>53.228.847.718</b>	<b>41.465.315.547</b>	<b>28,37</b>
Belanja Langganan Listrik	3.765.785.706	3.437.340.578	9,56
Belanja Langganan Telepon	84.238.141	72.931.755	15,50
Belanja Langganan Air	243.888.300	260.254.300	(6,29)
Belanja Jasa Konsultan	9.611.598.376	5.354.938.768	79,49
Belanja Sewa	13.774.081.140	6.112.537.996	125,34
Belanja Jasa Profesi	3.041.848.000	3.347.400.000	(9,13)
Belanja Jasa Lainnya	22.707.408.055	22.877.437.150	(0,74)
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	2.475.000	(100,00)
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>9.573.392.437</b>	<b>8.706.971.716</b>	<b>9,95</b>
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.352.389.958	5.001.294.827	7,02
Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	64.138.689	328.776.925	(80,49)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.156.863.790	3.376.899.964	23,10
<b>Belanja Perjalanan Dalam Negeri</b>	<b>61.147.678.288</b>	<b>69.382.050.115</b>	<b>(11,87)</b>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.693.505.624	37.903.532.129	(11,11)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.449.246.000	1.619.840.000	(10,53)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.653.879.924	11.219.340.346	30,61
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.351.046.740	18.639.337.640	(39,10)
<b>Belanja Perjalanan Luar Negeri</b>	<b>5.990.379.985</b>	<b>1.993.709.265</b>	<b>200,46</b>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	5.171.524.273	1.858.808.225	178,22
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	818.855.712	134.901.040	507,00
<b>Belanja Barang Persediaan</b>	<b>1.594.589.300</b>	<b>1.524.090.946</b>	<b>4,63</b>
Jumlah Belanja Kotor	186.336.099.886	174.384.949.018	6,85
Jumlah Pengembalian Belanja	(34.790.012)	(11.266.582)	208,79
Jumlah Belanja Netto	186.301.309.874	174.373.682.436	6,84

Dari realisasi belanja barang sebesar Rp186.301.309.874 tersebut, terdapat kesalahan pembebanan Belanja Barang untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk pengadaan aset tetap baru pada Sekretariat Kemenko Bidang PMK sebesar Rp566.186.459

*Belanja Modal*  
*Rp6.241.687.156*

### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.241.687.156 dan Rp2.150.408.496. Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2024 mengalami

kenaikan sebesar 190,26 persen dibandingkan realisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember TA 2023.

Kenaikan 190,26% tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya kenaikan pada pembelian peralatan dan mesin di satker Setmenko Bidang PMK sebesar 175,42% yang merupakan pembelian AC, lemari, sofa, meja kerja, serta peralatan dan perlengkapan lainnya senilai Rp3.989.079.472 untuk mendukung operasional Kemenko Bidang PMK, Kemenko PM dan BP Taskin (Kementerian Baru).
2. Adanya belanja modal gedung dan bangunan di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.513.618.842 (pada TA 2023 belanja modal ini tidak ada) dan belanja modal lainnya sebesar Rp738.988.842 merupakan pembangunan/renovasi pada Gedung Kemenko Bidang PMK dan Gedung Graha Kebun Sirih (gedung sewa) yang ditempati sebagai kantor Kemenko PM dan BP Taskin.

Adapun rincian belanja dimaksud tersaji pada tabel 18 dibawah ini:

*Tabel 18*  
*Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 pada Satker Setkemenko Bidang PMK*

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember TA 2024	Realisasi s.d 31 Desember TA 2023	Naik (Turun) % Terhadap 31 Desember 2023
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.989.079.472	1.448.387.405	175,42
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.513.618.842	-	-
Belanja Modal Lainnya	738.988.842	702.021.091	5,27
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>6.241.687.156</b>	<b>2.150.408.496</b>	<b>190,26</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.241.687.156</b>	<b>2.150.408.496</b>	<b>190,26</b>

**Tabel 19**  
**Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Satker Setkemenko Bidang PMK untuk**  
**Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember TA 2024**

No	Nama Barang	Harga Perolehan
1	Pembelian A.C. Sentral	218.385.285
2	Pembelian A.C. Split	113.054.750
3	Pembelian Alat Pendingin Lainnya	10.677.000
4	Pembelian Alat Penghancur Kertas	4.162.500
5	Pembelian Alat Rumah Tangga Lainnya	71.450.701
6	Pembelian Bean Bag	4.702.946
7	Pembelian Bracket Standing Peralatan	20.812.940
8	Pembelian Buffet	19.036.500
9	Pembelian Charger	1.799.000
10	Pembelian Charger	253.000.000
11	Pembelian Dehumidifier	11.400.000
12	Pembelian Dispenser	12.864.000
13	Pembelian Electric Boiler	1.431.000
14	Pembelian External/ Portable Hardisk	1.427.466
15	Pembelian Flip Chart	1.199.900
16	Pembelian Flip Chart	492.220.500
17	Pembelian Handy Talky (HT)	400.200.000
18	Pembelian Head Set	22.000.000
19	Pembelian Humidifier	25.212.096
20	Pembelian Kamera Digital	104.893.890
21	Pembelian Kasur/Spring Bed	10.850.250
22	Pembelian Kursi Besi/Metal	306.951.920
23	Pembelian Kursi Kayu	23.211.000
24	Pembelian Lambang Instansi	32.339.628
25	Pembelian Lap Top	75.300.000
26	Pembelian LCD Projector/Infocus	14.047.200
27	Pembelian Lemari Besi/Metal	5.480.000
28	Pembelian Lemari Es	13.185.800
29	Pembelian Lemari Kayu	229.912.331
30	Pembelian Lensa Kamera	49.948.667
31	Pembelian Lighting	4.990.000
32	Pembelian Meja Kerja Kayu	319.307.238
33	Pembelian Meja Makan Kayu	58.468.540
34	Pembelian Meja Rapat	56.577.350
35	Pembelian Meja Resepsionis	21.907.500
36	Pembelian Meja Ruang Tamu	20.577.942
37	Pembelian Meja Taman	3.065.762
38	Pembelian Mesin Absensi	61.500.000
39	Pembelian Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	5.311.350
40	Pembelian Microphone/Wireless MIC	11.650.000
41	Pembelian Microwave	4.847.000
42	Pembelian Mixer Sound Sistem	35.000.000
43	Pembelian Nakas	4.107.000
44	Pembelian Panggung	9.850.000
45	Pembelian Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	9.290.000
46	Pembelian Printer (Peralatan Personal Komputer)	96.174.465
47	Pembelian Printer (Peralatan Personal Komputer)	48.411.200
48	Pembelian Sofa	320.938.662
49	Pembelian Tablet PC	72.706.000
50	Pembelian Telephone Mobile	40.191.201
51	Pembelian Teleprompter	2.860.000
52	Pembelian Televisi	137.678.230
53	Pembelian Tripod	2.197.800
54	Pembelian Tripod Camera	2.400.000
55	Pembelian Vertikal Blind	44.865.676
56	Pembelian Voice Recorder	3.453.580
57	Pembelian Lukisan Lainnya	35.631.000
58	Pembelian barang ekstrakomptabel	3.964.706
<b>TOTAL</b>		<b>3.989.079.472</b>

Dari realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.989.079.472 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp3.949.483.766 menjadi penambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
2. Sebesar Rp35.631.000 menjadi penambah Aset Tetap Lainnya, dan

3. Sebesar Rp3.964.706 merupakan aset ekstrakomptabel (aset yang nilainya di bawah batas minimum kapitalisasi yang telah ditetapkan). Dengan kata lain, aset ini tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam laporan keuangan.

*Tabel 20*

*Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan di Satker Setkemenko Bidang PMK untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember TA 2024*

<b>No.</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Harga Perolehan</b>
1	Pembangunan gudang P7 Kemenko PMK	193.470.369
2	Interior Ruang Menko PMK	180.758.005
3	Renovasi Ruang PPID	181.642.231
4	Renovasi Ruang Kerja Menko PM	858.261.879
5	Pembuatan Back drop TV ruang Rapat , Hidden door, lantai Ruang Menteri PM	99.486.358
<b>Total</b>		<b>1.513.618.842</b>

Dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp193.470.369 menjadi penambah ke nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kemenko Bidang PMK yaitu pembangunan gudang P7 Kemenko Bidang PMK.
2. Sebesar Rp1.320.148.473 tidak menambah ke nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan melainkan menambah Aset tetap Renovasi. Hal tersebut karena renovasi tersebut dilakukan pada Gedung milik Kementerian Sekretariat Negara, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Renovasi interior ruang Menko PMK sebesar Rp180.758.005.
  - b. Renovasi ruang PPID sebesar Rp181.642.231.
  - c. Renovasi ruang kerja Menko PM sebesar Rp858.261.879.
  - d. Pembuatan Back drop TV Ruang Rapat, Hidden door, lantai Ruang Menteri PM sebesar Rp99.486.358.

*Tabel 21*  
*Realisasi Belanja Modal Lainnya sebagai Penambah Nilai Aset Tetap Lainnya di*  
*Satker Setkemenko Bidang PMK untuk Periode yang Berakhir*  
*pada Tanggal 31 Desember TA 2024*

No.	Nama Barang	Harga Perolehan
1	Lukisan canvas	7.000.000
2	Renovasi Ruang Kerja Gedung BPTaskin Lt 8 Site B di Gedung Graha Kebun Sirih	133.954.289
3	Renovasi kepala Badan Renovasi Ruang Kerja Gedung BPTaskin Lt 7 Site A di Gedung Grahab Kebun Sirih	191.938.302
4	Renovasi Ruang Kerja Gedung BPTaskin Lt 5 Site B di Gedung Graha Kebun Sirih	84.410.005
5	Renovasi Ruang Kerja Gedung BPTaskin Lt 7 Site A di Gedung Graha Kebun Sirih	142.888.501
6	Renovasi Ruang Kerja Gedung BPTaskin Lt 8 Site A di Gedung Graha Kebun Sirih	178.797.745
<b>Total</b>		<b>738.988.842</b>

Dari Realisasi Belanja Modal Lainnya sebesar Rp738.988.842 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp731.988.842 yang menjadi penambah Aset Tetap Renovasi, dan
2. Sebesar Rp7.000.000 merupakan penambah untuk Aset Tetap Lainnya.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### Aset Lancar

#### Aset Lancar

Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22  
Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember Tahun 2024

Jenis Aset Lancar	Jumlah	
Kas di Bendahara Pengeluaran		176.069.674
Kas Lainnya dan Setara Kas		247.348.852
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)		1.713.356.095
Piutang Bukan Pajak	33.960.000	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(169.800)	
Piutang Bukan Pajak (Netto)		33.790.200
Persediaan		322.959.788
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>2.493.524.609</b>

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp176.069.674

#### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp176.069.674 dan Rp425.456.798. Saldo ini terdiri dari Kas yang berasal dari sisa UP yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp3.208.171 dan kas yang berasal dari sisa TUP yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp172.861.503. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 23  
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember Tahun 2024

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah		
			UP	TUP	UP + TUP
1	419372	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Budaya dan Prestasi Olahraga	-	-	-
2	427768	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	89.219.000	89.219.000
3	427769	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	-	-	-
4	427770	Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	-	-	-
5	427771	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	-	-	-
6	427772	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda	-	-	-
7	427773	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	3.208.171	65.639.767	68.847.938
8	427785	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	-	18.002.736	18.002.736
		<b>TOTAL</b>	<b>3.208.171</b>	<b>172.861.503</b>	<b>176.069.674</b>

Sisa UP/TUP tersebut semua sudah disetor pada awal tahun 2025 dengan rincian bukti setor sebagai berikut:

No.	Kode Satker	Nama Satker	Keterangan		
			Tanggal	NTPN	Nilai
1	427768	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	9 Januari 2025	A94BD7NAS3MQFM75	89.219.000
2	427773	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	18 Januari 2025	960360JUTF6MK5BR	10.639.767
			17 Januari 2025	2DEE97NAS3PGAVHC	25.000.000
			17 Januari 2025	CB2FF2CPT4B5SUHR	30.000.000
			16 Januari 2025	6F623397CUT8OLSF	3.208.171
3	427785	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	07 Januari 2025	AAF866QTC944HEMM	18.002.736
<b>TOTAL</b>					<b>176.069.674</b>

*Kas Lainnya dan Setara Kas Rp247.348.852*

## C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp247.348.852 dan Rp112.406.778.

Kas lainnya dan setara kas per tanggal 31 Desember 2024 ini terdiri:

1. saldo pajak yang belum disetorkan ke kas negara.  
Saldo pajak yang belum disetorkan ke kas negara per 31 Desember Tahun 2024 pada satker sudah dilakukan penyetoran di awal tahun 2025, serta bukti setoran Penerimaan Negara tercantum pada Lampiran Laporan Keuangan ini.
2. saldo kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah.  
Kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp5.133.000 pada satker Setkemenko merupakan pengembalian sisa hibah ke donatur UNICEF.
3. Penyesuaian pencatatan rekening hibah.  
Saldo akhir sebesar Rp200 pada rekening hibah yang merupakan sisa dana dari hibah luar negeri yang tercatat sebagai penyesuaian administrasi karena merupakan nilai residu dari transaksi pembulatan atau biaya bank yang tidak dapat digunakan lebih lanjut. Sesuai prinsip materialitas dan efektivitas pengelolaan dana hibah, sisa saldo ini dilakukan penyesuaian pada laporan keuangan guna mencerminkan nilai aktual yang dapat digunakan serta untuk penyajian yang wajar sesuai SAP.

Adapun seluruh Kas Lainnya dan Setara kas per tanggal 31 Desember 2023 seluruhnya telah diselesaikan dan/atau disetorkan ke Kas Negara dengan penjelasan:

1. Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp50.629.000 dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Rp50.000.000 digunakan untuk belanja pada tahun anggaran 2024.
  - b. Rp629.000 dilakukan pengembalian ke donor dengan nomor Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung Nomor 241400600640001 tanggal 02 Juli 2024.
2. Saldo Pajak belum disetorkan ke kas Negara per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 43.051.820, dan Rp. 18.354.958 telah dilakukan penyetoran pada awal tahun 2024, dan telah diungkap pada Laporan Keuangan (*Audited*) TA 2023.
3. Adapun penyesuaian pencatatan rekening hibah, telah dilakukan penyesuaian pencatatan di tahun 2024 yang merupakan nilai residu dari transaksi hibah luar negeri yang telah sepenuhnya direalisasikan pada tahun-tahun sebelumnya, namun masih tersisa di rekening hibah.

Untuk Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Tabel 24*  
*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember Tahun 2024*

Uraian Satker	Jenis Transaksi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Setkemenko Bidang PMK (427768)	Pajak belum disetorkan ke Kas Negara	143.163.261	43.051.820
	Penyesuaian pencatatan Rekening hibah	200	371.000
	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	5.133.000	50.629.000
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya dan Prestasi (419372)	Pajak belum disetorkan ke Kas Negara	68.866.663	-
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama (427773)	Pajak belum disetorkan ke Kas Negara	2.859.140	
Set. DJSN (427785)	Pajak belum disetorkan ke Kas Negara	27.326.588	18.354.958
<b>Total</b>		<b>247.348.852</b>	<b>112.406.778</b>

*Belanja Dibayar  
Dimuka (prepaid)  
Rp1.713.356.095*

### **C.3. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.713.356.095 dan Rp322.880.682. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar Di Muka terdiri atas biaya sewa Gedung BP Taskin, biaya sewa gudang untuk penyimpanan arsip dan sewa kendaraan dinas roda empat pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional serta sewa, sewa kendaraan, mesin fotocopy, komputer, gudang, serta kendaraan operasional pejabat pada satuan kerja Menko PMK. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) adalah sebagai berikut:

**Tabel 25**  
**Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 31 Desember Tahun 2024**

No	Satker	Uraian	Nilai Kontrak	Masa Kontrak	Nilai Biaya Per bulan	Nilai Saldo Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024
1	Set. DJSN	Sewa Gudang	172.500.000	24 Bulan sejak 24 Januari 2023 - 23 Januari 2025	7.187.500	7.187.500
2	Set. DJSN	Sewa Kendaraan Roda 4/ Voxy 2024 / Trans Armada	198.000.000	12 Bulan sejak 16 April 2024 - 15 April 2025	16.500.000	66.000.000
3	Set. DJSN	Sewa Tableau	19.800.000	12 Bulan (27 Desember 2024 - 27 Desember 2025)	1.650.000	19.800.000
4	Setkemenko Bidang PMK	Pekerjaan Sewa Mesin Fotocopy 1 unit	54.612.000	12 bulan (April 2024 s.d Maret 2025)	4.551.000	13.653.000
5	Setkemenko Bidang PMK	Pengadaan Sewa Komputer Kemenko PMK TA 2024	843.600.000	10 bulan ( 25 Maret 2024 s.d 25 Januari 2025)	84.360.000	84.360.000
6	Setkemenko Bidang PMK	Pekerjaan Sewa Gedung BP Taskin	1.351.488.714	6 bulan (6 Desember 2024 s.d 6 Juni 2025)	225.248.119	1.126.240.595
7	Setkemenko Bidang PMK	Sewa Kendaraan Operasional Eselon I	422.400.000	12 bulan (07 Mei 2024 - 6 Mei 2025)	35.200.000	140.800.000
8	Setkemenko Bidang PMK	Sewa Kendaraan TNP2K Tahun 2024	342.000.000	12 bulan (1 Mei 2024 s.d 30 April 2025)	28.500.000	114.000.000
9	Setkemenko Bidang PMK	Sewa Rumah/apartemen beserta furnish bagi Pejabat Eselon I Kemenko PMK (Apartemen Sudirman Park Tower A Lantai 18 unit CK (46,86 m2)	118.800.000	12 bulan (1 April 2024-31 Maret 2025)	9.900.000	29.700.000
10	Setkemenko Bidang PMK	Sewa Rumah/apartemen beserta furnish bagi Pejabat Eselon I Kemenko PMK (Apartemen Mitra Oasis T/C 206, Kel Senen (67 m2)	113.300.000	12 bulan (1 April 2024-31 Maret 2025)	9.441.667	28.325.000
11	Setkemenko Bidang PMK	Sewa Rumah/apartemen beserta furnish bagi Pejabat Eselon I Kemenko PMK (Apartemen Mitra Oasis T/C 206, Kel Senen (67 m2)	113.300.000	12 bulan (1 April 2024-31 Maret 2025)	9.441.667	28.325.000
12	Setkemenko Bidang PMK	Sewa Rumah/apartemen beserta furnish bagi Pejabat Eselon I Kemenko PMK (Apartemen Mitra Oasis T/C 508, Kel Senen (67 m2)	113.300.000	12 bulan (1 April 2024-31 Maret 2025)	9.441.667	28.325.000
13	Setkemenko Bidang PMK	Sewa Gudang	26.640.000	3 bulan (23 Desember 2024 - 23 Maret 2025)	8.880.000	26.640.000
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>						<b>1.713.356.095</b>

Piutang dari KUN  
Rp33.960.000

#### C.4. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp33.960.000 dan Rp165.663.300. Piutang ini merupakan temuan pemeriksaan BPK atas keterlambatan pembayaran gaji pegawai bulan Oktober sampai dengan November tahun 2023 yang melaksanakan Cuti Luar Tanggungan Negara, kelebihan uang makan,

kelebihan honor output kegiatan dan kelebihan honor operasional satuan kerja Tahun 2024.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

*Tabel 26*  
*Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember Tahun 2024*

Uraian Satker	Jenis Transaksi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Menko Bidang PMK (427768)	Saldo atas Piutang atas kelebihan pembayaran Gaji pegawai CLTN a.n HD	-	10.180.800
	Kelebihan uang makan pegawai tahun 2023	-	13.079.000
	Kelebihan Honor Operasional Satker Tahun 2023	-	5.334.000
	Kelebihan Honor output kegiatan tahun 2023	33.960.000	137.069.500
<b>Jumlah</b>		<b>33.960.000</b>	<b>165.663.300</b>

Nilai piutang bukan pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.960.000 merupakan temuan pemeriksaan BPK atas kelebihan honor output kegiatan. Dasar pengakuan Piutang Bukan Pajak ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor: 51.b/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan dokumen penagihan dari KPA dan/atau PP.

Atas tagihan kelebihan honor ini masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran sudah menyampaikan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen dalam lingkup Kemenko Bidang PMK untuk melakukan penagihan dan segera melakukan penyetoran ke kas negara.

Adapun akun pengembalian piutang atas kelebihan pembayaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kelebihan gaji pegawai dan kelebihan uang makan pegawai masuk ke akun Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911).
2. Kelebihan honor operasional dan honor output masuk ke akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912).

Atas penerimaan piutang dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengurangi nilai piutang, dengan melakukan mengurangi akun Penerimaan Kembali Belanja Barang/Pegawai dan mengurangi akun Piutang Bukan Pajak. Rincian transaksi mutasi tambah dan mutasi kurang atas Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel 27**  
**Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Bukan Pajak per**  
**31 Desember Tahun 2024**

Uraian Satker	Jenis Transaksi	Saldo 31 Des 2024	Mutasi tambah selama TA 2024	Mutasi kurang selama TA 2024	Saldo 31 Des 2023
Menko Bidang PMK (427768)	Saldo atas Piutang atas kelebihan pembayaran Gaji pegawai CLTN a.n HD	-	-	10.180.800	10.180.800
	Kelebihan uang makan pegawai tahun 2023	-	-	13.079.000	13.079.000
	Jumlah Setoran Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL			23.259.800	
	Kelebihan Honor Operasional Satker Tahun 2023	-	-	5.334.000	5.334.000
	Kelebihan Honor output kegiatan tahun 2023	33.960.000	-	103.109.500	137.069.500
	Jumlah Setoran Penerimaan kembali Belanja Barang TAYL			108.443.500	
	<b>Jumlah</b>		<b>33.960.000</b>	<b>-</b>	<b>131.703.300</b>

Rincian sisa piutang atas kelebihan honor output kegiatan satker tahun 2023

No	Keterangan	Sisa Piutang
1	Kelebihan honor output kegiatan a.n AR	6.587.500
2	Kelebihan honor output kegiatan a.n AM	627.000
3	Kelebihan honor output kegiatan a.n AD	3.825.000
4	Kelebihan honor output kegiatan a.n BP	1.700.000
5	Kelebihan honor output kegiatan a.n DAW	850.000
6	Kelebihan honor output kegiatan a.n DN	2.295.000
7	Kelebihan honor output kegiatan a.n EF	760.000
8	Kelebihan honor output kegiatan a.n HN	1.530.000
9	Kelebihan honor output kegiatan a.n HH	1.425.000
10	Kelebihan honor output kegiatan a.n MP	5.044.500
11	Kelebihan honor output kegiatan a.n RK	1.198.500
12	Kelebihan honor output kegiatan a.n SPD	3.655.000
13	Kelebihan honor output kegiatan a.n WS	4.462.500
	<b>Jumlah</b>	<b>33.960.000</b>

*Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –Piutang  
Bukan Pajak  
(Rp169.800)*

### **C.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp169.800) dan (Rp828.317). Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Penyisihan disini menerapkan kualitas piutang lancar, yang berarti belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo dengan tarif penyisihan sebesar 0,5% dari Piutang Bukan Pajak.

Adapun rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel 28**  
**Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak**  
**per 31 Desember Tahun 2024**

Uraian Satker	Jenis Transaksi	31-Dec-24			31-Dec-23		
		Bruto	Penyisihan	Netto	Bruto	Penyisihan	Netto
Menko PMK (427768)	Piutang Bukan Pajak	33.960.000	(169.800)	33.790.200	165.663.300	(828.317)	14.284.947
<b>Jumlah</b>		<b>33.960.000</b>	<b>(169.800)</b>	<b>33.790.200</b>	<b>165.663.300</b>	<b>(828.317)</b>	<b>14.284.947</b>

*Piutang Bukan Pajak*  
*Netto Rp33.790.200*

### **C.6. Piutang Bukan Pajak (neto)**

Nilai Piutang Bukan Pajak (*neto*) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar *Neto* Rp33.790.200 dan Rp164.834.983. Piutang Bukan Pajak tahun 2024 setelah dikurangi dengan nilai estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendeknya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang (Penyisihan Piutang Tak Tertagih).

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 29**  
**Rincian Piutang Bukan Pajak (Neto) per 31 Desember Tahun 2024**

Uraian Satker	Jenis Transaksi	31-Dec-24			31-Dec-23		
		Bruto	Penyisihan	Neto	Bruto	Penyisihan	Neto
Menko PMK (427768)	Piutang Lainnya	33.960.000	(169.800)	33.790.200	165.663.300	(828.317)	164.834.984
<b>Jumlah</b>		<b>33.960.000</b>	<b>(169.800)</b>	<b>33.790.200</b>	<b>165.663.300</b>	<b>(828.317)</b>	<b>164.834.984</b>

*Persediaan*  
*Rp322.959.788*

### **C.7. Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp322.959.788 dan Rp528.859.588.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Adapun di Kemenko Bidang PMK Persediaan terdiri dari:

1. Barang konsumsi yang merupakan persediaan bahan untuk memenuhi kebutuhan rutin operasional kantor seperti namun tidak terbatas pada Kertas HVS, kertas folio, Bolpoin, pensil, penghapus, Map, amplop, Staples, isi staples, penggaris, Tinta printer, toner dll.
2. Bahan Untuk Pemeliharaan yang merupakan material yang digunakan secara berulang atau berkala dalam rangka perawatan dan pemeliharaan aset milik pemerintah (BMN) seperti kain lap kanebo, semir ban, shampo

pencuci mobil dan kemoceng yang digunakan untuk perawatan kendaraan dinas operasional pimpinan yang pengadaannya bukan bagian dari kontrak *Management Building* (pihak pengelola Gedung).

3. Sedangkan Persediaan Lainnya adalah persediaan obat-obatan, perlengkapan poliklinik, dan persediaan lainnya yang tidak dapat dikategorikan pada jenis persediaan tersebut di atas.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 terdapat persediaan dalam kondisi usang berupa Rapi Test Antigen yang sudah kadaluarsa (melewati batas masa pemakaian) sebesar Rp55.287.750.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 30*  
*Rincian Persediaan per 31 Desember Tahun 2024*

<b>Persediaan</b>	<b>31-Dec-24</b>	<b>31-Dec-23</b>
Barang Konsumsi	268.780.329	470.804.978
Bahan untuk Pemeliharaan	844.435	-
Persediaan Lainnya	53.335.024	58.054.610
<b>Jumlah</b>	<b>322.959.788</b>	<b>528.859.588</b>

Dan rincian persediaan per satuan kerja per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 31*  
*Rincian Persediaan Per Satuan Kerja per 31 Desember Tahun 2024*

<b>Persediaan</b>	<b>Satuan Kerja</b>		<b>Total</b>
	<b>Setkemenko Bidang PMK (427768)</b>	<b>Sekretariat DJSN (427785)</b>	
Barang Konsumsi	266.593.329	2.187.000	268.780.329
Bahan untuk Pemeliharaan	844.435	-	844.435
Persediaan Lainnya	53.335.024	-	53.335.024
<b>Jumlah</b>	<b>320.772.788</b>	<b>2.187.000</b>	<b>322.959.788</b>

Adapun rincian mutasi tambah nilai persediaan adalah sebagai berikut:

*Tabel 32*  
*Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Persediaan per 31 Desember Tahun 2024*

<b>Persediaan</b>	<b>Saldo 31 Des 2024</b>	<b>Mutasi tambah selama TA 2024</b>	<b>Mutasi kurang selama TA 2024</b>	<b>Saldo 31 Des 2023</b>
Barang Konsumsi	268.780.329	1.443.992.179	1.646.016.828	470.804.978
Bahan untuk Pemeliharaan	844.435	6.417.724	5.573.289	0
Persediaan Lainnya	53.335.024	144.179.397	148.898.983	58.054.610
<b>Jumlah</b>	<b>322.959.788</b>	<b>1.594.589.300</b>	<b>1.800.489.100</b>	<b>528.859.588</b>

Untuk mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah akun Persediaan berasal dari Pembelian barang persediaan dengan menggunakan satu akun belanja, yaitu Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) dengan nilai pembelian selama tahun 2024 sebesar Rp1.594.589.300.  
pada saat pencatatan, system Aplikasi Persediaan akan secara otomatis mengklasifikasi ke dalam jenis persediaan yang di Kemenko Bidang PMK, sehingga pembelian sebesar Rp1.594.589.300, terdistribusi ke dalam 3 (tiga) jenis persediaan, antara lain:
  - a. Barang konsumsi sebesar Rp1.443.992.179,
  - b. bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp6.417.724, dan
  - c. persediaan lainnya Rp144.179.397.
2. Sementara itu terdapat mutasi kurang sebesar Rp1.800.489.100 yang merupakan pemakaian persediaan selama tahun 2024 dan persediaan dalam kondisi usang, metode pencatatan yang digunakan adalah metode FIFO. mutasi kurang dapat dijabarkan sebagai berikut:
  - a. Barang konsumsi sebesar Rp1.646.016.828
    - 1) Pemakaian Barang Konsumsi Rp1.590.729.078
    - 2) Barang Usang karena kadaluarsa Rp55.287.750
  - b. Pemakaian bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp5.573.289 dan
  - c. Pemakaian persediaan lainnya sebesar Rp148.898.983.

## Aset Tetap

### Aset Tetap

Aset Tetap di Kemenko Bidang PMK per 31 Desember Tahun 2024 mempunyai Nilai Perolehan sebesar Rp257.403.551.234 dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp110.322.448.946 dan nilai buku sebesar Rp147.081.102.288. Aset Tetap dapat dirinci sebagai berikut:

*Tabel 33*  
*Rincian Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2024*

No	Aset Tetap	Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 95.078.561.272	Rp 84.580.682.893	Rp 10.497.878.379
2	Gedung dan Bangunan	Rp 157.293.492.299	Rp 25.549.491.828	Rp 131.744.000.471
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 144.386.000	Rp 54.829.225	Rp 89.556.775
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 4.788.551.663	Rp 137.445.000	Rp 4.651.106.663
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 98.560.000	Rp -	Rp 98.560.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 257.403.551.234</b>	<b>Rp 110.322.448.946</b>	<b>Rp 147.081.102.288</b>

*Tabel 34*  
*Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2024*

<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>248.585.167.474</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>10.549.672.339</b>
- Realisasi dari belanja modal	6.237.722.450
- Kapitalisasi belanja pemeliharaan	3.621.782.389
- Hibah masuk (Deputi 6)	519.117.500
- Koreksi mutasi aset lainnya ke aset tetap	171.050.000
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>(1.731.288.579)</b>
- Penghentian aset dari penggunaan	(8.305.000)
-Transfer Keluar ke Kemensetneg	(1.722.983.579)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>257.403.551.234</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(110.322.448.946)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>147.081.102.288</b>

Untuk mutasi tambah pada aset tetap yang berasal dari Belanja Modal dan Hibah masuk (Deputi 6), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp6.241.687.156, namun dari nilai realisasi tersebut yang menambah nilai aset adalah sebesar Rp6.237.722.450, selisihnya sebesar Rp3.964.706 masuk ke daftar barang ekstrakomptabel karena harga perolehannya dibawah Rp1.000.000.
2. Hibah masuk (Deputi 6) dari *Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) adalah sebesar Rp 524.550.500. Namun dari total hibah barang tersebut yang menjadi mutasi tambah ke dalam Peralatan dan Mesin (neraca) adalah sebesar Rp519.117.500, sisanya sebesar Rp5.433.000 dicatat dalam akun Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin (595112).

Secara detail per-akun Neraca akan dijelaskan pada penjelasan dibawah ini. Berikut rincian mutasi tambah dan kurang masing-masing Aset Tetap selama Tahun 2024:

No	Aset Tetap	Saldo 31 Des 2024	Mutasi tambah selama TA 2024	Mutasi kurang selama TA 2024	Saldo 31 Des 2023
1	Peralatan dan Mesin	95.078.561.272	5.540.074.265	8.305.000	89.546.792.007
2	Gedung dan Bangunan	157.293.492.299	1.271.832.833	193.470.369	156.215.129.835
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	144.386.000	-	-	144.386.000
4	Aset Tetap Lainnya	4.788.551.663	3.971.235.610	1.762.983.579	2.580.299.632
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.560.000	-	-	98.560.000
<b>Jumlah</b>		<b>257.403.551.234</b>	<b>10.783.142.708</b>	<b>1.964.758.948</b>	<b>248.585.167.474</b>

### C.8. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp95.078.561.272 dan Rp89.546.792.007. Pembelian peralatan dan mesin di tahun 2024 sebesar Rp3.949.483.766 oleh satker Setkemenko Bidang PMK. Transaksi terhadap Peralatan dan Mesin per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 35  
Rincian Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin pada Satker SetKemenko Bidang PMK per 31 Desember Tahun 2024

<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>89.546.792.007</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>5.540.074.265</b>
- Realisasi dari belanja modal peralatan dan mesin (Setkemenko)	3.949.483.766
- Kapitalisasi atas belanja Pemeliharaan yang menambah aset Tetap	900.422.999
- Hibah masuk (Kedeputian 6)	519.117.500
- Mutasi aset tetap lainnya ke aset tetap Peralatan Mesin	171.050.000
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>-8.305.000</b>
- Penghentian aset dari penggunaan	-8.305.000
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>95.078.561.272</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-84.580.682.893
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>10.497.878.379</b>

Selama tahun 2024 terdapat penambahan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.540.074.265 yang terdiri dari:

1. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp3.949.483.766,
2. Kapitalisasi belanja pemeliharaan yang menambah nilai aset sebesar Rp900.422.999,
3. Hibah barang dari *Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) pada satker Deputi 6 sebesar Rp524.550.500. Dari total hibah barang tersebut yang masuk ke dalam Peralatan dan Mesin adalah Rp519.117.500, sisanya sebesar Rp5.433.000 merupakan barang yang masuk ke barang ekstrakomptabel.
4. Koreksi aset tetap lainnya yang masih digunakan dalam operasional yang di mutasi ke aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp171.050.000.

Selain penambahan juga terdapat mutasi kurang sebesar Rp8.305.000 yaitu penghentian aset berupa Splitter dan LCD Projector/Infocus dikarenakan rusak. Rincian mutasi tambah Peralatan dan Mesin yang berasal dari kapitalisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Nilai (Rp)
1	Pekerjaan Pengadaan Karpet Kemenko PMK	390.710.000
2	Pekerjaan Pengadaan Backdrop dan Panggung Ruang Rapat Lantai 14 Gedung Kantor Kemenko PMK	175.476.459
3	Perbaikan Chiller AC Gedung Utama Kemenko PMK	137.127.180
4	Pemeliharaan Gedung dalam rangka Perbaikan AC Aula Heritage Zona A dan B Kemenko PMK	144.661.860
5	Pemeliharaan gedung dalam rangka perbaikan AC VRV It. 8 Kemenko PMK	52.447.500
<b>Jumlah</b>		<b>900.422.999</b>

Rincian mutasi tambah nilai peralatan dan mesin dari Hibah Barang pada Satker Deputi 6 adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
1	Personal Komputer Lainnya	2	34.608.000
2	LCD Monitor	8	38.539.200
3	Bracket Standing Peralatan	2	3.000.000
4	Microphone/Boom Stand	4	23.400.000
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	16.380.000
6	Serial Scanner/Printer	1	14.200.000
7	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	45.000.000
8	External/ Portable Hardisk	4	4.000.000
9	Shredder	1	8.625.000
10	Camera Conference	1	39.800.000
11	TV Monitor	2	25.700.000
12	Hub	6	20.769.000
13	Overhead Projector	1	26.100.000
14	Mini Komputer	6	150.796.800
15	Video Conference	1	14.500.000
16	Router	1	1.299.500
17	Handphone Encryption	8	52.400.000
<b>Jumlah barang hibah yang masuk Peralatan Mesin</b>			<b>519.117.500</b>
18	Kabel Roll	3	2.175.000
19	Cable	10	2.250.000
20	Peralatan Personal Komputer Lainnya	6	1.008.000
<b>Jumlah barang hibah yang masuk barang ekstrakomptabel</b>			<b>5.433.000</b>
<b>Nilai total hibah</b>			<b>524.550.500</b>

Rincian mutasi tambah nilai peralatan dan mesin dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Satker SetKemenko Bidang PMK adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Harga Perolehan
1	Pembelian A.C. Sentral	218.385.285
2	Pembelian A.C. Split	113.054.750
3	Pembelian Alat Pendingin Lainnya	10.677.000
4	Pembelian Alat Penghancur Kertas	4.162.500
5	Pembelian Alat Rumah Tangga Lainnya	71.450.701
6	Pembelian Bean Bag	4.702.946
7	Pembelian Bracket Standing Peralatan	20.812.940
8	Pembelian Buffet	19.036.500
9	Pembelian Charger	1.799.000
10	Pembelian Coffe maker	253.000.000
11	Pembelian Dehumidifier	11.400.000
12	Pembelian Dispenser	12.864.000
13	Pembelian Electric Boiler	1.431.000
14	Pembelian External/ Portable Hardisk	1.427.466
15	Pembelian Flip Chart	1.199.900
16	Focusing Screen/Layar LCD Projector	492.220.500
17	Pembelian Handy Talky (HT)	400.200.000
18	Pembelian Head Set	22.000.000
19	Pembelian Humidifier	25.212.096
20	Pembelian Kamera Digital	104.893.890
21	Pembelian Kasur/Spring Bed	10.850.250
22	Pembelian Kursi Besi/Metal	306.951.920
23	Pembelian Kursi Kayu	23.211.000
24	Pembelian Lambang Instansi	32.339.628
25	Pembelian Lap Top	75.300.000
26	Pembelian LCD Projector/Infocus	14.047.200
27	Pembelian Lemari Besi/Metal	5.480.000
28	Pembelian Lemari Es	13.185.800
29	Pembelian Lemari Kayu	229.912.331
30	Pembelian Lensa Kamera	49.948.667
31	Pembelian Lighting	4.990.000
32	Pembelian Meja Kerja Kayu	319.307.238
33	Pembelian Meja Makan Kayu	58.468.540
34	Pembelian Meja Rapat	56.577.350
35	Pembelian Meja Resepsionis	21.907.500
36	Pembelian Meja Ruang Tamu	20.577.942
37	Pembelian Meja Taman	3.065.762
38	Pembelian Mesin Absensi	61.500.000
39	Pembelian Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	5.311.350
40	Pembelian Microphone/Wireless MIC	11.650.000
41	Pembelian Microwave	4.847.000
42	Pembelian Mixer Sound Sistem	35.000.000
43	Pembelian Nakas	4.107.000
44	Pembelian Panggung	9.850.000
45	Pembelian Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	9.290.000
46	Pembelian Printer (Peralatan Personal Komputer)	96.174.465
47	Pembelian Printer (Peralatan Personal Komputer)	48.411.200
48	Pembelian Sofa	320.938.662
49	Pembelian Tablet PC	72.706.000
50	Pembelian Telephone Mobile	40.191.201
51	Pembelian Teleprompter	2.860.000
52	Pembelian Televisi	137.678.230
53	Pembelian Tripod	2.197.800
54	Pembelian Tripod Camera	2.400.000
55	Pembelian Vertikal Blind	44.865.676
56	Pembelian Voice Recorder	3.453.580
<b>TOTAL</b>		<b>3.949.483.766</b>

Dari saldo peralatan dan mesin per-31 Desember 2024 sebagaimana tersaji pada *Tabel 35 diatas* sebesar Rp95.078.561.272,00 tersebut, terdapat penyajian 212 unit Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp1.076.942.736 yang sampai dengan 16 Mei 2025 belum dapat ditelusuri keberadaannya. Selain itu, terdapat 327 unit Peralatan dan Mesin dengan harga perolehan sebesar Rp1.771.855.070,00 yang digunakan oleh Pihak Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Dari nilai tersebut, sebanyak 285 unit

sebesar Rp1.367.611.070,00 belum dilengkapi berita acara.

Gedung dan  
Bangunan  
Rp157.293.492.299

### C.9 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp157.293.492.299 dan Rp156.215.129.835. Terdapat penambahan asset gedung dan bangunan pada tahun 2024 yaitu pengadaan gudang P7 Kemenko Bidang PMK dengan nilai sebesar Rp193.470.369 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 36  
Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember Tahun 2024

<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>156.215.129.835</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>1.078.362.464</b>
- Realisasi dari Pengadaan gudang P7 Kemenko PMK Tahun 2024	193.470.369
- Kapitalisasi atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung yang Menambah nilai Gedung dan Banbunan	844.892.095
- Mutasi Aset Tetap Renovasi dari Satker DJSN	40.000.000
<b>Mutasi kurang:</b>	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>157.293.492.299</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(25.549.491.828)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>131.744.000.471</b>

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan merupakan nilai gedung yang dimiliki Kemenko Bidang PMK saja, karena pada lokasi Kantor Kemenko Bidang PMK terdapat beberapa gedung dan bangunan yang merupakan Aset Tetap milik Kementerian Sekretariat Negara, sehingga renovasi-renovasi yang dilakukan terhadap selain gedung milik Kemenko Bidang PMK bukan menambah ke nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp1.513.618.842. Dari nilai belanja modal tersebut sebesar Rp1.320.148.473 merupakan pekerjaan renovasi yang dilakukan pada Gedung Milik Kementerian Sekretariat Negara yang dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi, dan sebesar Rp193.470.369 merupakan pekerjaan renovasi pada Gedung milik Kemenko Bidang PMK. Sehingga yang menjadi penambah nilai Gedung dan Bangunan hanya Rp193.470.369.

Mutasi tambah nilai Gedung dan Bangunan selain dari Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transfer masuk Aset Tetap Renovasi dari Satker DJSN (427785) ke Satker Setmenko Bidang PMK (427768) sebesar Rp40.000.000.  
Transfer masuk & transfer keluar ini terjadi karena Satker DJSN melakukan renovasi bangunan di Gedung dan Bangunan yang secara pembukuan tercatat pada Satker Setmenko Bidang PMK. dan
2. Kapitalisasi atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp844.892.095.

Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan □	Nilai
1	Pemeliharaan Gedung dalam rangka Perbaikan lift Gedung di lingkungan Kemenko PMK	46.731.000
2	Renovasi Plafon Lobby Belakang	125.904.192
3	Pekerjaan Pemasangan Lantai Sinstered Stone Lobby Belakang Gedung Kemenko PMK	198.277.968
4	Pekerjaan Stainless Jamb Lift dan Emergency Door Jamb	93.073.500
5	Pekerjaan interior lobby belakang	148.098.808
6	Pekerjaan Perbaikan AC Sentral /chiller Gedung Utama di Lingkungan Kemenko PMK	111.304.140
7	Pemasangan lantai sintered stone hadap taman dan hadap jalan abdul muis, Kantor Kemenko PMK	121.502.487
	<b>Jumlah</b>	<b>844.892.095</b>

*Jalan Irigasi dan Jaringan  
Rp144.386.000*

### **C.10 Jalan Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sama yaitu sebesar Rp144.386.000. Saldo tersebut terdiri dari jaringan transmisi tegangan diatas 300 KVA dan jaringan transmisi tegangan 100 s/d 300 KVA. Tidak terjadi perubahan saldo terhadap jalan jaringan dan irigasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2024. Transaksi terhadap Jalan Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel 37*  
*Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember Tahun 2024*

<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>144.386.000</b>
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>144.386.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(54.829.225)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>89.556.775</b>

Rincian aset tetap Jalan Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Barang Pengguna pada Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya*  
*Rp4.788.551.663*

### **C.11 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.788.551.663 dan Rp2.580.299.632.

Saldo Aset Tetap Lainnya tersebut terdiri dari dua akun pembentuk, yaitu:

1. Aset Tetap Renovasi sebesar Rp3.928.604.610 dan
2. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp859.947.053.

Transaksi mutasi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel 38*  
*Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya Satker Setmenko per 31 Desember Tahun 2024*

No	Jenis Aset	Saldo 31 Des 2024	Mutasi tambah selama TA 2024	Mutasi kurang selama TA 2024	Saldo 31 Des 2023
1	Aset Tetap Renovasi	3.928.604.610	3.928.604.610	1.762.983.579	1.762.983.579
2	Aset Tetap Lainnya	859.947.053	42.631.000	-	817.316.053
<b>Jumlah</b>		<b>4.788.551.663</b>	<b>3.971.235.610</b>	<b>1.762.983.579</b>	<b>2.580.299.632</b>

<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>2.580.299.632</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>3.971.235.610</b>
- Pembelian lukisan canvas	42.631.000
- Gedung dan bangunan dalam renovasi	2.052.137.315
- Kapitalisasi dari belanja pemeliharaan gedung yang menambah nilai Aset Tetap Lainnya	1.876.467.295
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>- 1.762.983.579</b>
- Transfer Keluar ke Kementerian Sekretariat Negara berupa gedung dan bangunan hasil pengadaan renovasi 2023	- 1.722.983.579
- Mutasi keluar Aset Tetap renovasi DJSN ke Aset Gedung dan Bangunan	- 40.000.000
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>4.788.551.663</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	- 137.445.000
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>4.651.106.663</b>

Mutasi kurang aset tetap renovasi merupakan transfer keluar ke Kementerian Sekretariat Negara pada bulan September 2024 berupa gedung dan bangunan hasil pengadaan renovasi Tahun 2023 senilai Rp1.722.983.579 dengan nomor BAST 01/BAST/ROUM.SDM/RT.05.00/09/2024 Tanggal 23 September 2024. Adapun rincian mutasi tambah untuk Aset Tetap Renovasi sebesar Rp.3.928.604.610 adalah sbb:

1. Pekerjaan renovasi terhadap Gedung milik Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp2.052.137.315, yang terdiri dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.320.148.473 dan Belanja Modal Lainnya sebesar Rp731.988.842.
2. Kapitalisasi belanja pemeliharaan yang menambah nilai aset tetap renovasi sebesar Rp1.876.467.295.

Rincian pekerjaan atas renovasi dan kapitalisasi belanja pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Uraian Pekerjaan	Nilai
Pekerjaan Renovasi selama Tahun 2024	Pekerjaan renovasi ruang kerja Kemenko PM	858.261.879,00
	Pekerjaan renovasi ruang tunggu PPID	181.642.231,00
	Pembuatan Backdrop TV ruang rapat, hidden door, lantai ruang Menko PM	99.486.358,00
	Renovasi ruang kerja Gedung BP Taskin Lt. 5 Site B	84.410.005,00
	Renovasi ruang kerja Gedung BP Taskin Lt.7 Site A	142.888.501,00
	Renovasi ruang kerja Gedung BP Taskin Lt. 8 Site B	133.954.289,00
	Pekerjaan interior ruang Menko PMK	180.758.005,00
	Renovasi ruang kerja Gedung BP Taskin Lt. 8 Site A	178.797.745,00
	Renovasi ruang kerja Gedung BP Taskin Lt. 7 Site A	191.938.302,00
<b>Jumlah Renovasi Tahun 2024</b>		<b>2.052.137.315,00</b>
Kapitalisasi atas Belanja Pemeliharaan	Perbaiki Ruang Inspektorat Lantai 4 dalam rangka Pemeliharaan Gedung Kantor Kemenko PMK	186.835.144,00
	Pekerjaan Interior Ruang Inspektorat	73.217.709,00
	Renovasi Ruang Depan Lift & Depan Ruang Inspektorat Lt. 4	94.028.854,00
	Renovasi Ruang PPID	35.222.076,00
	Renovasi Plafon Lobby Depan Gedung Kemenko PMK	149.817.865,00
	Pekerjaan Interior Lobby Depan Gedung Kemenko PMK	194.100.705,00
	Pekerjaan Pemasangan Lantai Sintered Stone Lobby Depan	175.140.906,00
	Pekerjaan Logo, Panel Kaca, dan Ornamen Batik Gedung Kantor Kemenko PMK	132.935.265,00
	Renovasi Ruang Tunggu VIP	136.067.474,00
	Pekerjaan Pengadaan Pemasangan Vinyl di Ruang Heritage Kemenko PMK	318.125.000,00
	Perbaiki Ruang Depan Lift dan Depan Ruang Inspektorat lantai 3 dalam rangka Pemeliharaan Gedung Kemenko PMK	101.713.229,00
	Pemasangan Lantai Ruang Menko Pemberdayaan Masyarakat Lantai 1	130.658.211,00
	Pembuatan Ruang Istirahat, Ruang Makan, dan Shower Menko Pemberdayaan Masyarakat	148.604.857,00
<b>Jumlah Kapitalisasi Beban Pemeliharaan</b>		<b>1.876.467.295,00</b>
<b>Total Penambahan Aset Tetap Renovasi</b>		<b>3.928.604.610,00</b>

Sedangkan rincian transaksi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Saldo 31 Des 2024	Mutasi tambah selama TA 2024	Mutasi kurang selama TA 2024	Saldo 31 Des 2023
1	Buku Lainnya	584.011.053	-	-	584.011.053
2	Lukisan Kanvas	83.660.000	7.000.000	-	76.660.000
3	Alat Musik Modern/Band	137.445.000	-	-	137.445.000
4	Lukisan Cat Minyak	2.700.000	-	-	2.700.000
5	Lukisan Lainnya	52.131.000	35.631.000	-	16.500.000
<b>Jumlah</b>		<b>859.947.053</b>	<b>42.631.000</b>	<b>-</b>	<b>817.316.053</b>

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp42.631.000 dapat dijelaskan sbb:

1. Belanja modal Peralatan dan Mesin atas pembelian lukisan lainnya sebesar Rp35.631.000, dan

2. Realisasi belanja modal lainnya atas pembelian lukisan kanvas sebesar Rp7.000.000.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan  
Rp98.560.000

### C.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sama sebesar Rp98.560.000. Nilai tersebut berasal dari pengadaan desain renovasi ruang rapat lantai 14 Kemenko Bidang PMK Tahun 2023. Sesuai rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK Nomor 51.b/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas pemeriksaan tahun 2023 menyebutkan bahwa BPK merekomendasikan Menko Bidang PMK untuk memerintahkan Sekretaris Kemenko Bidang PMK untuk berkoordinasi dengan DJKN terkait penyajian KP pada neraca Kemenko Bidang PMK.

Kemenko Bidang PMK telah melakukan beberapa tindak lanjut sbb:

1. Tanggal 25 Juli 2024, dilakukan rapat daring dengan DJKN dan berdasarkan pembahasan awal, DJKN mengusulkan agar diajukan usulan penghapusan pada bulan Agustus 2024.
2. Tanggal 22 Agustus 2024 Sekretaris Kemenko Bidang PMK mengirimkan surat permohonan penghapusan konstruksi dalam pengerjaan kepada Kepala KPKNL III. Namun dalam proses pengajuan tersebut terdapat kendala di KPKNL, karena harus menunggu migrasi data ke aplikasi SIMAN terbaru untuk melakukan penghapusan. Sehingga sampai akhir periode pelaporan per 31 Desember 2024 ini, belum dilakukan penghapusan.

Berikut disajikan rangkuman Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024.

*Tabel 39  
Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan  
per 31 Desember Tahun 2024*

<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>98.560.000</b>
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>98.560.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>98.560.000</b>

Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
(Rp110.322.448.946)

### C.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp110.322.448.946) dan (Rp100.374.428.145). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 40  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2024

No	Jenis Aset	Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 95.078.561.272	Rp 84.580.682.893	Rp 10.497.878.379
2	Gedung dan Bangunan	Rp 157.293.492.299	Rp 25.549.491.828	Rp 131.744.000.471
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 144.386.000	Rp 54.829.225	Rp 89.556.775
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 4.788.551.663	Rp 137.445.000	Rp 4.651.106.663
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 98.560.000	Rp -	Rp 98.560.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 257.403.551.234</b>	<b>Rp 110.322.448.946</b>	<b>Rp 147.081.102.288</b>

### ASET LAINNYA

### ASET LAINNYA

Aset Lainnya di Kemenko Bidang PMK per 31 Desember Tahun 2024 bersaldo sebesar Rp15.649.556.722 yang terdiri dari Aset Tak Berwujud sebesar Rp3.501.599.293, Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp7.872.533.489 dan Aset Lain-lain Rp4.275.423.940. Rincian Aset Lainnya di Kemenko Bidang PMK Per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 41  
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember Tahun 2024

No	Aset Lainnya	Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	Rp 3.357.207.893	Rp 2.937.556.908	Rp 419.650.985
2	ATB Lainnya	Rp 144.391.400	Rp -	Rp 144.391.400
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 3.501.599.293</b>	<b>Rp 2.937.556.908</b>	<b>Rp 564.042.385</b>
B	Aset Lain Lain	Rp 4.275.423.940	Rp 3.596.723.940	Rp 678.700.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 4.275.423.940</b>	<b>Rp 3.596.723.940</b>	<b>Rp 678.700.000</b>
C	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	Rp 7.872.533.489	Rp -	Rp 7.872.533.489
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 7.872.533.489</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 7.872.533.489</b>
<b>Total</b>		<b>Rp 15.649.556.722</b>	<b>Rp 6.534.280.848</b>	<b>Rp 9.115.275.874</b>

Aset Tak Berwujud  
Rp3.501.599.293

#### C.14 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sama sebesar Rp3.501.599.293. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Transaksi terhadap Aset Tak Berwujud per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 42  
Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud  
per 31 Desember Tahun 2024

<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>4.324.975.793</b>
Mutasi tambah:	-
<b>Mutasi kurang:</b>	-
- Koreksi penghapusan aset tak berwujud yang sudah tidak digunakan	(823.376.500)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>3.501.599.293</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(2.937.556.908)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>564.042.385</b>

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 43  
Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember Tahun 2024

No.	Uraian	Nilai
1	<b>Software Komputer</b>	<b>3.357.207.893</b>
2	<b>ATB Lainnya</b>	<b>144.391.400</b>
	Buku Digital	106.441.400
	ATB Lainnya	37.950.000
<b>Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024</b>		<b>3.501.599.293</b>
Amortisasi ATB s.d. 31 Desember 2024		-2.937.556.908
<b>Jumlah</b>		<b>564.042.385</b>

Dana Yang Dibatasi  
Penggunaannya  
Rp7.872.533.489

#### C.15. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.872.533.489 dan Rp3.277.806.321. Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Rincian Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Tabel 44**  
*Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember Tahun 2024*

No	Satker	Nomor Kontrak	Nomor SPM	Tanggal	Nilai Kontrak
1	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	28/SPK/PPK.REN/UKPBJ/0 2/2024	02183A	23-12-2024	Rp 6.765.000
2	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	29/SPK/PPK.REN/UKPBJ/0 2/2024	02176A	23-12-2024	Rp 6.500.000
3	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	30/SPK/PPK.REN/UKPBJ/0 2/2024	02181A	23-12-2024	Rp 6.000.000
4	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	31/SPK/PPK.REN/UKPBJ/0 2/2024	02186A	23-12-2024	Rp 5.700.000
5	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	32/SPK/PPK.ROUM/UKPBJ/ 02/2024	02179A	23-12-2024	Rp 5.706.000
6	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	33/SPK/PPK.ROUM/UKPBJ/ 02/2024	02178A	23-12-2024	Rp 5.706.000
7	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	34/SPK/PPK.ROUM/UKPBJ/ 02/2024	02180A	23-12-2024	Rp 5.706.000
8	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	35/SPK/PPK.ROUM/UKPBJ/ 02/2024	02182A	23-12-2024	Rp 5.706.000
9	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	36/SPK/PPK.ROUM/UKPBJ/ 02/2024	02174A	27-12-2024	Rp 1.710.851.744
10	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	37/SPK/PPK.ROUM/UKPBJ/ 02/2024	02177A	23-12-2024	Rp 10.300.000

No	Satker	Nom or Kontrak	Nom or SPM	Tanggal	Nilai Kontrak
11	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	39/SPK/PPK.ROUM/UKPBJ/02/2024	02187A	23-12-2024	Rp 5.706.000
12	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	67/SPK/PPK.ROUM/UKPBJ/04/2024	02198A	23-12-2024	Rp 5.700.000
13	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	73/SPK/PPK.RoUM/UKPBJ/04/2024	02200A	23-12-2024	Rp 5.700.000
14	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	74/SPK/PPK.ROUM/UKPBJ/04/2024	02201A	23-12-2024	Rp 5.700.000
15	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	75/SPK/PPK.ROUM/UKPBJ/04/2024	02199A	23-12-2024	Rp 5.700.000
16	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	81/SPK/PPK.ROUM/UKPBJ/05/2024	02202A	23-12-2024	Rp 5.700.000
17	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	B-44/PPK/SPK/PJP/III/2024	02191A	23-12-2024	Rp 7.750.000
18	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	B-45/PPK/SPK/PJP/III/2024	02196A	23-12-2024	Rp 7.750.000
19	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	B.46/PPK/SPK/PJP/III/2024	02197A	23-12-2024	Rp 7.750.000
20	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.1/PPK.ROHUPOK/01/2024	02204A	23-12-2024	Rp 5.700.000
21	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.10/PPK.ROHUPOK/01/2024	02215A	23-12-2024	Rp 5.700.000
22	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.11/PPK.ROHUPOK/01/2024	02216A	23-12-2024	Rp 5.700.000
23	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.12/PPK.ROHUPOK/01/2024	02217A	23-12-2024	Rp 5.700.000
24	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.13/PPK.ROHUPOK/01/2024	02218A	23-12-2024	Rp 7.000.000
25	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.14/PPK.ROHUPOK/01/2024	02219A	23-12-2024	Rp 8.000.000
26	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.15/PPK.ROHUPOK/01/2024	02220A	23-12-2024	Rp 5.700.000
27	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.2/PPK.ROHUPOK/01/2024	02207A	23-12-2024	Rp 5.700.000
28	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.2/PPK.ROREN/01/2024	02172A	23-12-2024	Rp 6.400.000
29	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.2/PPK.ROSIPD/01/2024	02227A	23-12-2024	Rp 5.700.000
30	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.20/PPK.ROHUPOK/01/2024	02222A	23-12-2024	Rp 6.000.000
31	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.21/PPK.ROHUPOK/01/2024	02223A	23-12-2024	Rp 5.700.000
32	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.23/PPK.ROHUPOK/01/2024	02224A	23-12-2024	Rp 5.700.000
33	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.3/PPK.ROHUPOK/01/2024	02208A	23-12-2024	Rp 5.700.000
34	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.3/PPK.ROREN/01/2024	02173A	23-12-2024	Rp 5.700.000
35	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.35/PPK.ROHUPOK/01/2024	02225A	23-12-2024	Rp 5.700.000
36	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.36/PPK.ROHUPOK/01/2024	02226A	23-12-2024	Rp 6.000.000
37	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.37/PPK.ROHUPOK/01/2024	02228A	23-12-2024	Rp 110.000.000
38	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.4/PPK.ROHUPOK/01/2024	02209A	23-12-2024	Rp 5.700.000
39	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.5/PPK.ROHUPOK/01/2024	02210A	23-12-2024	Rp 6.000.000
40	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.6/PPK.ROHUPOK/01/2024	02211A	23-12-2024	Rp 5.700.000
41	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.7/PPK.ROHUPOK/01/2024	02212A	23-12-2024	Rp 5.700.000
42	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.8/PPK.ROHUPOK/01/2024	02213A	23-12-2024	Rp 5.700.000
43	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	SPK.9/PPK.ROHUPOK/01/2024	02214A	23-12-2024	Rp 5.700.000
44	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	22/SPK/PPK/DEP.I/II/2024	00148A	20-12-2024	Rp 6.000.000
45	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	23/SPK/PPK/DEP.1/II/2024	00147A	20-12-2024	Rp 5.700.000
46	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	24/SPK/PPK/DEP.1/II/2023	00149A	20-12-2024	Rp 5.700.000

No	Satker	Nomor Kontrak	Nomor SPM	Tanggal	Nilai Kontrak
47	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	25/SPK/PPK/DEP.II/2024	00150A	20-12-2024	Rp 5.700.000
48	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	26/SPK/PPK/DEP.II/2024	00151A	20-12-2024	Rp 5.700.000
49	DEPUTI BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PENANGGULANGAN BENCANA	45/SPK/PPK2/P3PD/UKPBJ/08/2024	00107A	20-12-2024	Rp 734.776.000
50	DEPUTI BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PENANGGULANGAN BENCANA	46/SPK/PPK2/P3PD/UKPBJ/08/2024	00108A	20-12-2024	Rp 1.010.660.000
51	SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL	40/KONTRAK.SWAKELOLA/PPK.DJSN/UKPBJ/09/2024	00260A	24-12-2024	Rp 248.658.335
52	DEPUTI BIDANG KOORDINASI REVOLUSI MENTAL, PEMAJUAN BUDAYA DAN PRESTASI OLAHRAGA	12/SPK/BARANG/PPK.RM PBPO/12/2024	00545A	23-12-2024	Rp 447.000.000
53	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	01/SPK/PPK/Bandwidth/01/2024	02164A	23-12-2024	Rp 487.500.000
54	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	04/SPK/BANDWIDTH/01/2024	02168A	23-12-2024	Rp 324.750.000
55	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	04/SPK/PPK/JK/01/2024	02167A	23-12-2024	Rp 14.980.560
56	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	05/SPK/PPK/BANDWIDTH/01/2024	02169A	23-12-2024	Rp 173.250.000
57	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	05/SPK/PPK/JB/01/2024	02166A	23-12-2024	Rp 35.019.760
58	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	06/SPK/PPK/JP/01/2024	02165A	23-12-2024	Rp 26.719.497
59	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	107/SPK/PPK.ROUM/UKPB J/07/2024	02221A	23-12-2024	Rp 5.700.000
60	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	14/PPK/SPK/PJP/1/2024	02170A	23-12-2024	Rp 12.000.000
61	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	15/PPK/SPK/PJP/1/2024	02171A	23-12-2024	Rp 9.150.000
62	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	204/SPK/PPK/SK/12/2024	02205A	23-12-2024	Rp 1.351.488.714
63	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	206/SPK/PPK.ROUM/UKPB J/12/2024	02206A	27-12-2024	Rp 858.261.879
64	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	22/PPK/SPK/PJP/1/2024	02161A	23-12-2024	Rp 5.706.000
65	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	23/PPK/SPK/PJP/1/2024	02175A	23-12-2024	Rp 5.706.000
66	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	27/PPK/SPK/PJP/1/2024	02184A	23-12-2024	Rp 13.710.000
67	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	27/SPK/PPK.REN/UKPB/J/02/2024	02185A	23-12-2024	Rp 6.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>Rp 7.872.533.489</b>

Saldo dana yang dibatasi penggunaannya merupakan nilai transaksi Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) per 31 Desember 2024. Seluruh

transaksi RPATA ini sudah selesai dilakukan pembayaran pada Bulan Januari 2025. Rekapitulasi pembayaran RPATA terlampir dalam Laporan Keuangan ini.

*Aset Lain-Lain*  
*Rp4.275.423.940*

### C.16. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.275.423.940 dan Rp9.406.528.013. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional kantor sehari-hari serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Aset Lain-lain terdiri dari dua akun pembentuk, yaitu:

1. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi sebesar Rp2.809.847.440 dan
2. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional sebesar Rp1.465.576.500.

Transaksi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Saldo 31 Des 2024	Mutasi tambah selama TA 2024	Mutasi kurang selama TA 2024	Saldo 31 Des 2023
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi	2.809.847.440	498.919.250	6.453.399.823	8.764.328.013
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional	1.465.576.500	823.376.500	-	642.200.000
<b>Jumlah</b>		<b>4.275.423.940</b>	<b>1.322.295.750</b>	<b>6.453.399.823</b>	<b>9.406.528.013</b>

*Tabel 45*  
*Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Lain-lain*  
*per 31 Desember Tahun 2024*

<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>9.406.528.013</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>1.322.295.750</b>
- Penghentian Splitter dan LCD/Proyektor karena rusak	8.305.000
- Koreksi audit pembatalan penghapusan aset	490.614.250
- Koreksi usulan penghapusan ATB yang sudah tidak digunakan	823.376.500
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>6.453.399.823</b>
- Tindak lanjut penghapusan temuan BPK 2023	4.713.451.823
- Koreksi audit penghapusan mobil yang sudah terjual di lelang	1.568.898.000
- Koreksi audit reklas ke Aset Tetap Lemari Besi	171.050.000
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>4.275.423.940</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(3.596.723.940)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>678.700.000</b>

Selama tahun 2024 terdapat mutasi tambah *Aset Lain-lain* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghentian aset dari penggunaan Splitter dan LCD/Proyektor karena barang tersebut rusak, nilainya sebesar Rp8.305.000. Pada tahun 2024,
2. Koreksi audit TA 2024 sebesar Rp. Rp490.614.250.  
Angka tersebut merupakan bagian dari Aset Rusak Berat senilai Rp4.713.451.823 yang sudah diusulkan untuk dihapuskan (*off ballance sheet*) sebagai tindak lanjut dari temuan BPK RI TA 2013, Namun saat pemeriksaan dari barang-barang yang diusulkan dihapus tersebut (Pemeriksaan LK TA 2024) terdapat barang yang masih digunakan dan dalam kondisi baik, sehingga terdapat koreksi audit untuk melakukan pembatalan usulan penghapusan sehingga menambah kembali nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi sebesar Rp490.614.250.
3. Selain itu juga terdapat Aset Tak Berwujud yang sudah tidak digunakan sehingga harus di reklas ke Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi sebesar Rp823.376.500.

Selain mutasi tambah nilai Aset Lain-Lain, terdapat mutasi kurang aset lain-lain yaitu:

1. Usulan penghapusan 3 unit Mobil Sedan Teana yang sudah terjual pada saat Lelang pada tanggal 18 September tahun 2024 sebesar Rp1.568.898.000. (koreksi audit 2024).
2. Usulan penghapusan atas Aset Rusak Berat yang merupakan tindak lanjut temuan BPK Tahun 2023 Rp. Rp4.713.451.823.
3. Serta koreksi audit untuk reklas Lemari Besi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena masih digunakan dalam operasional sebesar Rp. 171.050.000.

Berikut rincian usulan penghapusan yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan BPK:

**Tabel 46**  
**Rincian Penghapusan temuan BPK**

Kode Barang	Nama Barang	Berkurang		Bertambah	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
3010304001	Transportable Generating Set	0	-	1	97.365.400,00
3020101001	Sedan	0	-	0	-
3020102003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	0	-	0	-
3020104001	Sepeda Motor	0	-	0	-
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	0	-	1	1.609.410,00
3050102007	Mesin Penghitung Uang	0	-	1	3.419.625,00
3050104001	Lemari Besi/Metal	0	-	0	-
3050105015	Alat Penghancur Kertas	0	-	5	29.700.000,00
3050105038	Laser Pointer	0	-	1	447.095,00
3050105048	LCD Projector/Infocus	1	6.380.000,00	9	156.614.040,00
3050199999	Alat Kantor Lainnya	0	-	1	11.385.000,00
3050201002	Meja Kerja Kayu	0	-	42	139.103.250,00
3050201003	Kursi Besi/Metal	0	-	34	58.384.150,00
3050201004	Kursi Kayu	0	-	18	31.046.400,00
3050201022	Partisi	0	-	30	98.099.633,00
3050206002	Televisi	0	-	27	392.621.774,00
3050206007	Loudspeaker	0	-	10	86.004.290,00
3050206014	Microphone	0	-	1	15.962.222,00
3050206015	Microphone Table Stand	0	-	1	8.061.429,00
3050206017	Unit Power Supply	0	-	1	54.656.800,00
3050206036	Dispenser	0	-	2	4.290.000,00
3050206056	Karpet	0	-	0	-
3050206068	DVD Player	0	-	1	1.818.929,00
3060101002	Audio Mixing Portable	0	-	1	15.101.429,00
3060101036	Microphone/Wireless MIC	0	-	11	55.556.163,00
3060101040	Power Supply Microphone	0	-	3	95.987.320,00
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	0	-	1	2.750.000,00
3060101088	Voice Recorder	0	-	1	927.795,00
3060102012	Video Monitor	0	-	1	25.300.000,00
3060102013	Video Tape Recorder Portable	0	-	1	51.700.000,00
3060102016	Video Switcher	0	-	2	8.037.858,00
3060102151	Splitter	1	1.925.000,00	7	24.247.145,00
3060102165	Camera Conference	0	-	1	99.499.000,00
3060201010	Facsimile	0	-	1	1.277.320,00
3080112025	Stabilizer	0	-	0	-
3080141251	Stabilizer/UPS	0	-	16	9.120.000,00
3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	0	-	2	4.178.288,00
3090407005	Lemari Camera	0	-	1	4.658.500,00
3100102001	P.CUnit	0	-	136	1.778.585.255,00
3100102002	Lap Top	0	-	5	122.775.634,00
3100102003	Note Book	0	-	46	721.614.125,00
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	-	89	306.368.544,00
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	0	-	7	186.488.000,00
3100204024	Switch	0	-	2	8.690.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>8.305.000,00</b>	<b>520</b>	<b>4.713.451.823,00</b>

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
(Rp6.534.280.848)*

### **C.17. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp6.534.280.848) dan (Rp11.647.231.690). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 47**  
*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember Tahun 2024*

No	Aset Lainnya	Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	Rp 3.357.207.893	Rp 2.937.556.908	Rp 419.650.985
2	ATB Lainnya	Rp 144.391.400	Rp -	Rp 144.391.400
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 3.501.599.293</b>	<b>Rp 2.937.556.908</b>	<b>Rp 564.042.385</b>
B	Aset Lain Lain	Rp 4.275.423.940	Rp 3.596.723.940	Rp 678.700.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 4.275.423.940</b>	<b>Rp 3.596.723.940</b>	<b>Rp 678.700.000</b>
C	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	Rp 7.872.533.489	Rp -	Rp 7.872.533.489
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 7.872.533.489</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 7.872.533.489</b>
<b>Total</b>		<b>Rp 15.649.556.722</b>	<b>Rp 6.534.280.848</b>	<b>Rp 9.115.275.874</b>

**Kewajiban**

**Kewajiban**

Rincian Saldo Kewajiban per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48**  
*Rincian Saldo Kewajiban per 31 Desember Tahun 2024*

Jenis Aset Lancar	Jumlah
Utang kepada Pihak Ketiga	8.144.289.042
Uang Muka dari KPPN	176.069.674
Utang Jangka Pendek Lainnya	242.215.652
<b>Jumlah</b>	<b>8.562.574.368</b>

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp8.144.289.042*

**C.18. Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp8.144.289.042 dan Rp3.573.467.610. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada pihak ketiga terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp159.752.500, belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp112.984.947, serta utang pada pihak ketiga lainnya sebesar Rp7.871.551.595.

Rincian hutang belanja pegawai, hutang belanja bahan dan hutang kepada pihak ketiga lainnya dari Satker SetKemenko Bidang PMK adalah sebagai berikut:

*Tabel 49*  
*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember Tahun 2024*

<b>Nama Akun</b>	<b>Tanggal Jurnal</b>	<b>Kode Periode</b>	<b>Nomor Dokumen</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Nilai</b>
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	31-Dec-24	2024-12	53	Akrual Kekurangan tunjangan kinerja bulan Desember 2024	137.877.500
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	31-Dec-24	2024-12	54	Akrual Kekurangan honor PPNPN bulan Desember 2024	21.875.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	31-Dec-24	2024-12	56	Jurnal atas tunggakan biaya perjalanan dinas lewat tahun	112.984.947
Utang pihak ketiga lainnya	31-Dec-24	2024-12		Transaksi RPATA	7.871.551.595
<b>TOTAL</b>					<b>8.144.289.042</b>

Belanja pegawai yang masih harus dibayar merupakan tunjangan kinerja dan honor bulan Desember untuk lima orang PPNPN sebesar Rp137.877.500 dan Rp21.875.000. Pembayaran belanja utang pegawai tersebut sudah dilakukan pada tanggal 09 Januari 2025. Belanja barang yang masih harus dibayar merupakan tunggakan tiket biaya perjalanan dinas dan tunggakan perjalanan dinas akhir tahun 2024 sebesar Rp91.284.200 dan Rp21.700.747. Utang pihak ketiga lainnya sebesar Rp7.871.551.595 merupakan transaksi RPATA per 31 Desember 2024. Transaksi RPATA ini seluruhnya sudah dilakukan pembayaran pada Januari 2025.

*Uang Muka dari  
KPPN  
Rp176.069.674*

### **C.19. Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp176.069.674 dan Rp425.456.798. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 50*  
*Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember Tahun 2024*

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah		
			UP	TUP	UP + TUP
1	419372	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Budaya dan Prestasi Olahraga	-	-	-
2	427768	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	89.219.000	89.219.000
3	427769	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	-	-	-
4	427770	Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	-	-	-
5	427771	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	-	-	-
6	427772	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda	-	-	-
7	427773	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	3.208.171	65.639.767	68.847.938
8	427785	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	-	18.002.736	18.002.736
<b>TOTAL</b>			<b>3.208.171</b>	<b>172.861.503</b>	<b>176.069.674</b>

*Utang Jangka Pendek Lainnya*  
*Rp242.215.652*

### **C.20. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp242.215.652 dan Rp61.406.778. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga Uang Muka dari KPPN dan Pendapatan Yang Ditanggihkan. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut:

*Tabel 51*  
*Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya*

Uraian Satker	Jenis Transaksi	31 Des 2024
Setkemenko Bidang PMK (427768)	Pajak belum disetorkan ke Kas Negara	143.163.461
	Kelebihan setor kas hibah	- 200
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama (427773)	Pajak belum disetorkan ke Kas Negara	2.859.140
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Budaya dan Prestasi Olahraga (419372)	Pajak belum disetorkan ke Kas Negara	68.866.663
Set. DJSN (427785)	Pajak belum disetorkan ke Kas Negara	27.326.588
<b>Total</b>		<b>242.215.652</b>

*Ekuitas*  
*Rp150.127.328.403*

### **C.21. Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing - masing sebesar Rp150.127.328.403 dan Rp151.066.925.409. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB  
Rp0

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp9. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dirinci sebagai berikut;

Tabel 52  
Perbandingan Rincian Pendapatan untuk Periode yang Berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Pendapatan	Pendapatan		%Naik (Turun)
	TA 2024	TA 2023	
<b>Pendapatan PNBP Lainnya</b>			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Sewa Tanah Gedung Bangunan	-	-	-
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-
Jumlah Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Lalu	-	-	-
Penerimaan Lain-lain	-	9	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain	-	9	-
<b>Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya</b>	-	9	-
<b>Pendapatan BLU</b>			
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan BLU</b>	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	9	-

Beban Operasional  
Rp329.047.271.142

### Beban Operasional

Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 53  
Beban Operasional untuk Periode yang Berakhir pada  
31 Desember 2024

Uraian Jenis Beban	TA 2024	TA 2023	%Naik (Turun)
Beban Pegawai	77.016.658.249	66.713.211.693	15,44
Beban Persediaan	1.739.628.061	1.884.175.583	-7,67
Beban Barang dan Jasa	166.139.416.297	95.644.073.924	73,71
Beban Pemeliharaan	5.957.183.337	7.512.757.935	-20,71
Beban Perjalanan Dinas	67.225.210.708	71.374.198.070	-5,81
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	60.424.000	-100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	10.969.174.490	10.337.400.021	6,11
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	828.317	-100,00
<b>Jumlah Beban</b>	<b>329.047.271.142</b>	<b>253.527.069.543</b>	<b>29,79</b>

Adapun secara rinci atas beban – beban operasional diatas, akan dijelaskan pada akun akun beban operasional dibawah ini:

## D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp77.016.658.249 dan Rp66.713.211.693. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang tidak berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 54  
Perbandingan Rincian Beban Pegawai untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian Jenis Beban Pegawai	Beban Pegawai		Naik / (Turun) %
	TA 2024	TA 2023	
Beban Gaji Pokok PNS	20.210.173.500	19.173.930.550	5,40
Beban Pembulatan Gaji PNS	286.890	303.225	(5,39)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.378.532.650	1.249.701.720	10,31
Beban Tunj. Anak PNS	319.699.458	290.561.192	10,03
Beban Tunj. Struktural PNS	2.167.000.000	2.210.705.000	(1,98)
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.455.267.000	2.204.882.000	11,36
Beban Tunj. PPh PNS	368.567.894	218.345.061	68,80
Beban Tunj. Beras PNS	947.688.120	956.523.360	(0,92)
Beban Uang Makan PNS	2.181.908.050	2.288.999.650	(4,68)
Beban Tunjangan Umum PNS	369.470.000	528.045.000	(30,03)
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	284.375.000	325.000.000	(12,50)
Beban Gaji Pokok PPPK	1.198.376.200	284.889.500	320,65
Beban Pembulatan Gaji PPPK	18.706	3.629	415,46
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	52.697.040	11.345.840	364,46
Beban Tunjangan Anak PPPK	13.390.176	2.877.096	365,41
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	188.510.000	45.115.000	317,84
Beban Tunjangan Beras PPPK	54.749.520	13.542.540	304,28
Beban Uang Makan PPPK	165.752.000	35.828.000	362,63
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	-	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	44.660.196.045	36.872.613.330	21,12
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>77.016.658.249</b>	<b>66.713.211.693</b>	<b>15,44</b>

Jumlah Beban Pegawai untuk tahun 2024 sebesar Rp77.016.658.249 mengalami kenaikan sebesar Rp10.303.446.556 atau 15,44% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp66.713.211.693.

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada:

1. Tunjangan suami/istri, anak, dan fungsional PNS, masing-masing naik sebesar 10,31%, 10,03%, dan 11,36%.
2. Tunjangan PPh PNS mengalami lonjakan sebesar 68,80%.
3. Di sisi lain, tunjangan umum PNS mengalami penurunan sebesar 30,03% akibat transformasi jabatan dari Fungsional Umum ke Fungsional Tertentu.

4. Selain itu, pengangkatan PPPK tahun 2024 juga berkontribusi terhadap kenaikan belanja gaji dan tunjangan terkait.

Terdapat perbedaan antara beban gaji pada LO (Rp77.016.658.249) dan LRA (Rp76.870.781.869), yaitu sebesar Rp145.876.380, yang merupakan pengakuan secara akrual atas gaji yang belum dibayarkan hingga 31 Desember 2024.

*Beban Persediaan  
Rp1.739.628.061*

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.739.628.061 dan Rp1.884.175.583. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan mengalami penurunan sebesar Rp144.547.522 atau 7,67%, Penurunan ini bersifat wajar dan mencerminkan efisiensi serta penyesuaian atas kebutuhan barang habis pakai di lingkungan kerja.

*Tabel 55  
Perbandingan Rincian Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian Jenis Beban Persediaan	Beban Persediaan		Naik (Turun)
	TA 2024	TA 2023	
Beban Persediaan Konsumsi	1.590.729.078	1.678.776.605	(5,24)
Beban Persediaan Lainnya	148.898.983	205.398.978	(27,51)
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>1.739.628.061</b>	<b>1.884.175.583</b>	<b>(7,67)</b>

*Beban Barang dan  
Jasa  
Rp166.139.416.297*

### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp166.139.416.297 dan Rp95.644.073.924. Terjadi kenaikan sebesar Rp70.495.342.373 atau 73,71%.

Adapun kenaikan signifikan di TA 2024 ini berasal dari beberapa pos belanja berikut:

1. Beban Sewa naik sebesar 104,99% jika dibandingkan dengan TA 2023, adapun kenaikan pada beban ini karena mengakomodir keperluan operasional sewa kendaraan dan sewa gedung kantor untuk kementerian baru yaitu Kemenko PM dan BP Taskin; dan
2. Beban jasa lainnya naik sebesar 217,96% dan beban jasa konsultan naik sebesar 80,42%. Adapun kenaikan beban jasa lainnya cukup signifikan karena adanya realisasi dari belanja hibah sebesar Rp59.892.924.180 pada tahun 2024. Sedangkan untuk kenaikan beban jasa konsultan karena

adanya peningkatan belanja jasa konsultan pada kegiatan P3PD, peningkatan intensitas kegiatan operasional, pelaksanaan forum nasional dan internasional, kebutuhan penyusunan dokumen rencana awal K/L Baru (BP Taskin dan Kemenko PM), serta kebutuhan konsumsi dalam koordinasi lintas K/L yang sangat intens ditahun 2024.

- Adapun untuk beban – beban lain terdapat kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan (saling subset) merupakan dampak penyesuaian kebutuhan dukungan belanja operasional sehari-hari sebagaimana secara detail disajikan pada Tabel 56 dibawah ini.

*Tabel 56  
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian Jenis Beban Barang dan Jasa	Beban Barang dan Jasa		Naik (Turun) %
	TA 2024	TA 2023	
Beban Keperluan Perkantoran	29.361.276.754	25.257.631.903	16,25
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	152.561.840	186.420.000	(18,16)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	5.026.273.735	5.520.364.000	(8,95)
Beban Barang Operasional Lainnya	2.601.096.704	2.387.447.126	8,95
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	-	93.996.675	(100,00)
Beban Bahan	14.047.830.986	13.224.858.997	6,22
Beban Honor Output Kegiatan	2.006.640.500	2.649.449.750	(24,26)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.576.195.979	1.830.737.439	(13,90)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	13.806.772	-	-
Beban Langganan Listrik	3.479.101.992	3.451.275.597	0,81
Beban Langganan Telepon	78.241.397	72.601.892	7,77
Beban Langganan Air	243.888.300	260.254.300	(6,29)
Beban Jasa Konsultan	9.661.598.376	5.354.938.768	80,42
Beban Sewa	12.393.530.727	6.045.824.731	104,99
Beban Jasa Profesi	3.041.848.000	3.347.400.000	(9,13)
Beban Jasa Lainnya	82.450.091.235	25.931.153.246	217,96
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	5.433.000	27.244.500	(80,06)
<b>Jumlah</b>	<b>166.139.416.297</b>	<b>95.644.073.924</b>	<b>73,71</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp5.957.183.337*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.957.183.337 dan Rp7.512.757.935. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Secara keseluruhan, terdapat penurunan sebesar 20,71%. Penurunan signifikan ini terjadi akibat:

1. Penurunan 54,55% pada pemeliharaan gedung dan bangunan karena sebagian dicatat sebagai kapitalisasi aset tetap.
2. Penurunan 80,49% pada beban asuransi gedung, akibat keterlambatan anggaran yang baru tersedia pada November–Desember 2024.
3. Adanya peningkatan beban pemeliharaan dan mesin sebesar 23,11% karena penyesuaian kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan peralatan akibat peningkatan aktifitas dukungan operasional kantor.

Secara detail, tersaji pada Tabel 75 dibawah ini:

*Tabel 57*  
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Beban Pemeliharaan	Beban Pemeliharaan		Naik (Turun) %
	TA 2024	TA 2023	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.730.607.569	3.807.319.568	(54,55)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.156.863.790	3.376.661.442	23,11
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	64.138.689	328.776.925	(80,49)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	5.573.289	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.957.183.337</b>	<b>7.512.757.935</b>	<b>(20,71)</b>

Beban Perjalanan Dinas  
Rp67.225.210.708

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp67.225.210.708 dan Rp71.374.198.070. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Terdapat penurunan sebesar Rp4.148.987.362 atau 5,81%. Penurunan ini tidak signifikan secara material, dan disebabkan oleh optimalisasi penggunaan teknologi informasi seperti *video conference* dan *hybrid meeting* yang menggantikan sebagian aktivitas perjalanan dinas fisik khusus dalam negeri, meskipun frekuensi kegiatan koordinatif tetap tinggi.

Khusus perjalanan dinas luar negeri mengalami kenaikan yang cukup signifikan masing-masing 177,17% untuk beban perjalanan biasa – Luar Negeri dan 507,00% untuk beban perjalanan lainnya – luar negeri dikarenakan cukup banyaknya penugasan presiden untuk koordinasi Internasional terkait isu isu strategis diantaranya Monitoring Pelaksanaan Haji, Bantuan Internasional ke beberapa negara diantaranya Vietnam dan Laos, termasuk mewakili pemerintah Indonesia dalam kegiatan internasional lainnya di Brazil dan Cina. Secara detail akan dirinci pada tabel 58 dibawah ini:

**Tabel 58**  
*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian Jenis Beban Perjalanan Dinas	Beban Perjalanan Dinas		Naik (Turun) %
	TA 2024	TA 2023	
Beban Perjalanan Biasa	33.798.665.513	38.029.716.819	(11,13)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.449.246.000	1.619.840.000	(10,53)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.522.699.924	11.219.340.346	29,44
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.483.726.740	18.511.591.640	(37,96)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	5.152.016.819	1.858.808.225	177,17
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	818.855.712	134.901.040	507,00
<b>Jumlah</b>	<b>67.225.210.708</b>	<b>71.374.198.070</b>	<b>(5,81)</b>

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat pada TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp60.424.000. Terjadi penurunan 100%, dikarenakan tidak terdapat alokasi maupun realisasi belanja atas barang yang diserahkan kepada masyarakat pada tahun 2024, seiring dengan adanya kebijakan refocusing anggaran.

**Tabel 59**  
*Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian Jenis Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		Naik (Turun) %
	TA 2024	TA 2023	
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	60,424,000	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>60,424,000</b>	<b>100.00</b>

*Beban Bantuan Sosial Rp0*

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sama yaitu sebesar Rp0. Hal ini dikarenakan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tidak dianggarkan Belanja Bantuan Sosial sehingga tidak terdapat Beban Bantuan Sosial.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp10.969.174.490*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.969.174.490 dan Rp10.337.400.021. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable*

assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Terjadi penurunan sebesar 6,11%. Penurunan ini disebabkan oleh aset tetap yang nilai buku Rp.0 (nol) dan tidak dapat disusutkan lagi pada tahun berjalan sehingga tidak terbentuk beban penyusutan pada tahun 2024, terutama pada kelompok aset peralatan dan mesin kantor serta aset tak berwujud lainnya.

*Tabel 60*  
*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi*  
*untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Beban Penyusutan dan Amortisasi		NAIK (TURUN) %
	s.d 31 Desember TA 2024	s.d 31 Desember TA 2023	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.542.724.827	5.918.115.575	10,55
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.411.239.683	3.393.851.853	0,51
Beban Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan	3.609.650	3.609.650	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	172.298.357	172.298.359	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>10.129.872.517</b>	<b>9.487.875.437</b>	<b>6,77</b>
Beban Amortisasi Software	839.301.973	839.301.974	(0,00)
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	10.222.610	(100,00)
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>839.301.973</b>	<b>849.524.584</b>	<b>(1,20)</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>10.969.174.490</b>	<b>10.337.400.021</b>	<b>6,11</b>

*Beban Penyisihan*  
*Piutang Tak*  
*Tertagih Rp0*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp828.317. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban yang terjadi untuk mencadangkan atau menyisihkan sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Terjadi penurunan sebesar 100%, disebabkan karena tidak adanya penambahan piutang dengan risiko tak tertagih di tahun 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam manajemen penagihan piutang dan peningkatan kualitas piutang secara keseluruhan.

*Beban Lain-lain*  
*Rp0*

#### **D.11. Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sama yaitu sebesar Rp0.

Surplus/ Defisit Dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp929.920.681

#### D.12. SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Total Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp929.920.681, meningkat sebesar 486,62% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp158.520.589. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penerimaan klaim asuransi BMN, pengembalian belanja tahun lalu, dan setoran sisa utang pensiunan, dengan penjelasan sbb:.

1. Pendapatan (surplus) dari pelepasan aset pada tahun 2024 sebesar Rp326.025.000;
2. Pendapatan (surplus) dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp659.183.431 terdiri dari:
  - a. Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN Rp 231.134.080,
  - b. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp2.155,
  - c. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp398.124.978 dan
  - d. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan sebesar Rp29.922.218
3. Beban (defisit) dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp55.287.750 merupakan Beban Persediaan Rusak/Usang.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

*Tabel 61*  
*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional*  
*untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian Surplu/Defisit Kegiatan Non Operasional	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional		Naik (Turun) %
	TA 2024	TA 2023	
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan Pelapasan aset	326.025.000	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus dari kegiatan Non operasional lainnya	603.895.681	158.520.589	280,96
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	659.183.431	189.317.401	248,19
- Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	55.287.750	30.796.812	79,52
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>929.920.681</b>	<b>158.520.589</b>	<b>486,62</b>

Pos-Pos Luar Biasa  
Rp0

#### D.13. POS-POS LUAR BIASA

Pos Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sama yaitu sebesar Rp0.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal  
Rp151.066.925.409*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 masing-masing adalah sebesar Rp151.066.925.409 dan Rp158.492.415.800.

*Surplus(defisit) LO  
(Rp328.117.350.461)*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Surplus (Defisit) Laporan Operasional (LO) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar (Rp328.117.350.461) dan (Rp253.368.548.945). Defisit LO mencerminkan selisih antara pendapatan dan beban operasional, non-operasional, dan kejadian luar biasa selama satu periode akuntansi.

*Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar Rp0*

### **E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**

Tidak terdapat transaksi terkait dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi atau kesalahan mendasar pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 maupun 31 Desember 2023.

*Koreksi yang  
Menambah/Mengurangi  
Ekuitas (Rp2.198.241)*

### **E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**

koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp2.198.241), terdiri dari:

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar (Rp2.227.758), terkait penghapusan UPS yang sebelumnya telah diusulkan hapus pada tahun 2023, namun baru dilakukan penghapusan di sistem SAKTI pada tahun 2024.
2. Koreksi Lain-lain sebesar Rp29.517, merupakan penyesuaian atas nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023, koreksi tercatat sebesar Rp30.113.533.

*Penyesuaian Nilai Aset  
Rp0*

#### **E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Saldo Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sama sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0*

#### **E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. tidak terdapat transaksi yang mengakibatkan koreksi terhadap nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

*Selisih Revaluasi Aset  
Tetap Rp0*

#### **E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian kembali aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sama sebesar Rp0.

*Koreksi Nilai Aset Tetap  
Non Revaluasi  
(Rp2.227.758)*

#### **E.4.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp2.227.758) dan Rp23.809.500. Nilai tersebut merupakan UPS yang sudah rusak namun masih ada nilai bukunya, lalu dimasukkan ke usul hapus di tahun 2023. Namun atas usul hapus tersebut baru dilakukan penghapusan di SAKTI pada tahun 2024. Atas usul hapus Tahun Anggaran Yang Lalu tersebut maka menambah ke Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.

*Koreksi Lain-lain  
Rp29.517*

#### **E.4.5 Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp29.517 dan Rp6.304.033. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain pengembalian ke kas negara atas saldo hibah dari UNICEF Tahun 2023, lalu koreksi nilai Beban Penyisihan Piutang yang bersaldo negatif, serta penyesuaian atas nilai penyisihan piutang tak tertagih.

*Transaksi Antar Entitas  
Rp327.179.951.696*

#### **E.5 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp327.179.951.696 dan Rp245.912.945.021. Rincian Transaksi antar entitas terdiri dari:

*Tabel 62*  
*Rincian Nilai Transaksi antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.127.807.020)
Ditagihkan ke Entitas Lain	268.820.657.983
Transfer Keluar	(1.418.386.863)
Transfer Masuk	40.000.000
Pengesahan Hibah Langsung	60.969.504.680
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(104.017.084)
<b>Jumlah</b>	<b>327.179.951.696</b>

Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- a. Diterima dari Entitas Lain sebesar (Rp1.127.807.020) adalah seluruh transaksi penerimaan negara yang berasal dari Kemenko PMK sampai triwulan IV tahun 2024.
- b. Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp268.820.657.983 adalah seluruh transaksi pembayaran atas SPM yang di ajukan oleh Kemenko PMK ke KPPN sampai triwulan IV Tahun 2024.
- c. Transfer Keluar sebesar Rp1.418.386.863 merupakan transfer keluar Aset Tetap Renovasi oleh Satker Setmenko ke Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp1.378.386.863 dan transfer keluar Aset Tetap Renovasi oleh Satker DJSN ke Satker Setmenko sebesar Rp40.000.000.
- d. Transfer Masuk sebesar Rp40.000.000 merupakan penerimaan atas transfer asset tetap renovasi dari Satker DJSN.
- e. Terdapat pengesahan hibah berupa uang, jasa dan barang dari beberapa donatur dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 63*  
*Rincian Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang*  
*di Satker Setkemenko Bidang PMK*

Nama Donatur	Nomor Register	Nama Proyek	Jumlah (Rupiah)
United Nations Children's Fund (UNICEF)	2E3K1TFA	Kegiatan Penguatan Gugus Tugas PAUD HI Tahun 2023	652.271.000
<b>TOTAL PENGESAHAN HIBAH</b>			<b>652.271.000</b>

Dari pengesahan hibah langsung bentuk uang dari UNICEF sebesar Rp652.271.000, terdapat pengesahan pengembalian kas hibah sebesar Rp104.017.084 pada tanggal 31 Desember 2024 dengan nomor surat pengesahan 241400600640003.

**Tabel 64**  
**Rincian Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Jasa dan Barang**  
**di Satker Setkemenko Bidang PMK**

<b>Nama Donatur</b>	<b>Nomor Register</b>	<b>Nama Proyek</b>	<b>Jumlah (Rupiah)</b>
Friedrich Ebert Stiftung (FES)	2LZBCVHA	Program Pembangunan Manusia untuk Mempercepat Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	4.996.257.082
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)	2V6PXMMA	Program PROAKTIF (Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang Komprehensif, Inklusif, dan Adaptif)	49.018.843.224
Jan Glockauer	2HAB6ZFA	Implementasi Program Kemitraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia	1.252.696.000
Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH	2V71C36A	Technical and Vocational Education Training (TVET) System Reform	2.138.416.179
Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH	2V71C36A	Technical and Vocational Education Training (TVET) System Reform	524.550.500
<b>TOTAL PENGESAHAN HIBAH</b>			<b>57.930.762.985</b>

**Tabel 65**  
**Rincian Pengesahan Hibah Jasa dan Barang**  
**di Satker Sekretariat DJSN**

<b>Nama Donatur</b>	<b>Nomor Register</b>	<b>Nama Proyek</b>	<b>Jumlah (Rupiah)</b>
Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH	2JZB4NPA	Program Migrasi dan Diaspora	2.386.470.695
<b>TOTAL PENGESAHAN HIBAH</b>			<b>2.386.470.695</b>

*Ekuitas Akhir*  
*Rp150.127.328.403*

### **E.6 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp150.127.328.403 dan Rp151.066.925.409.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Kejadian-Kejadian  
Penting Setelah  
Tanggal Neraca

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Sampai dengan laporan keuangan ini disusun tidak terdapat kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal neraca dan berpengaruh secara signifikan terhadap saldo-saldo yang dilaporkan pada Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024.

Pengungkapan  
Lain-Lain

### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Dapat disampaikan bahwa di Kemenko PMK tidak ada permasalahan hukum yang sedang dihadapi yang belum ada keputusan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan berpotensi untuk menimbulkan tagihan ke negara di masa yang akan datang.

2. Pinjaman Luar Negeri (PLN) di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pinjaman Luar Negeri Langsung (*Direct Loan*) yang tercatat dalam DIPA, yaitu dari *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dengan nama program "*Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)*". Pinjaman ini masuk ke dalam DIPA Satker Deputy 2 yaitu Asisten Deputy Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial. Berikut penjelasan mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024:

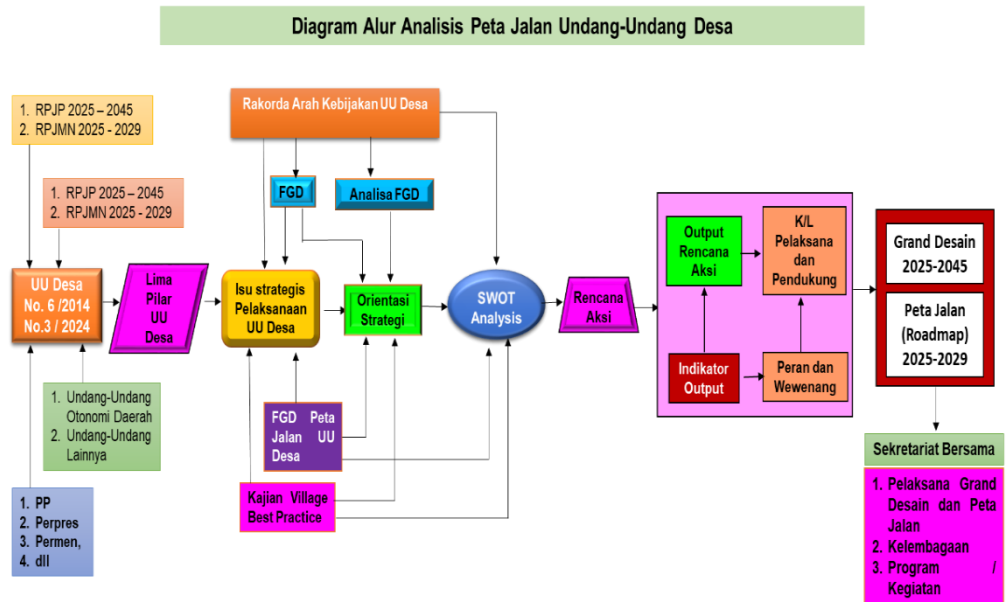
Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Implikasi pelaksanaan Undang-undang Desa, makin besarnya alokasi anggaran dari pemerintah yang masuk ke Desa. Pemerintah telah menyalurkan Dana Desa. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang secara mandatory digunakan untuk membiayai: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu tantangan dalam penguatan pemerintahan dan pembangunan Desa adalah optimalisasi pemanfaatan berbagai pendanaan untuk pembangunan desa dan sinergi program dan kegiatan yang dilaksanakan di Desa. Selama ini, pendanaan program dan kegiatan dengan lokus desa yang

berhasil dipetakan dari 3 (tiga) sumber pendanaan yaitu pendanaan dari Kementerian/Lembaga, pendanaan dari pemerintah daerah, dan Dana Desa. Selama ini sudah banyak data/platform masing-masing K/L, akan tetapi masih banyak permasalahan yang tersedia, seperti data yang kurang terpadu, instrumen yang tumpang tindih, dan data yang tidak dapat dilihat oleh masyarakat. Oleh karena itu, melalui P3PD, salah satu inisiasi Kemenko PMK yaitu untuk menyusun Dokumen Strategi Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Dokumen Strategi Pelaksanaan Undang-Undang Desa yang berkelanjutan memerlukan penyusunan berbagai strategi yang komprehensif. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah dan masyarakat desa dalam menjalankan undang-undang tersebut. Penting untuk mendorong upaya-upaya peningkatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat desa agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif. Dalam dokumen ini, terdapat lima pilar utama pelaksanaan UU Desa, yaitu pemerintahan desa dan penguatan kapasitas desa, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi desa, yang diintegrasikan secara holistik dalam dokumen strategi pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Dengan adanya dokumen strategi yang tersusun dengan baik, diharapkan pelaksanaan UU Desa dapat menjadi refleksi nasional yang nyata dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam percepatan pembangunan di daerah. Peningkatan kapasitas baik dalam pemerintahan desa maupun masyarakatnya, serta pembangunan yang terencana, akan membawa dampak positif dalam jangka panjang. Pemerintah dan masyarakat desa dapat bekerja sama dalam mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, desa-desa di Indonesia dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang tangguh, sekaligus meminimalkan kesenjangan antar wilayah di Indonesia.



Gambar 1 Pilar-pilar Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa

Berdasarkan tugas dan fungsi Kemenko PMK terkait Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) untuk memastikan terjadinya konvergensi dalam keterlibatan multi pihak di desa, maka prinsip utama yang harus dijadikan konsideran adalah melakukan debottlenecking, fasilitasi koordinasi di tingkat pusat dalam rangka memastikan peran masing-masing Kementerian/Lembaga, dan optimalisasi peran multipihak agar inline dengan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk mengakomodir hal tersebut, maka Kemenko PMK bersama Bappenas dalam Komponen 3 P3PD akan membentuk *Steering*

*Committee* atau Sekretariat Bersama P3PD.

Keberadaan *Steering Committee* atau Sekretariat Bersama P3PD tersebut tidak hanya sebatas pada periode pelaksanaan P3PD yang akan berakhir di tahun 2024. Keberadaan tim ini diharapkan dimanfaatkan secara jangka panjang dan merupakan salah satu bentuk *legacy* dan *exit* strategi pelaksanaan P3PD.

Beberapa prinsip yang harus dilaksanakan agar keberlangsungan Sekretariat Bersama P3PD ini dapat terlaksana antara lain adalah: wawasan ke depan, keterpaduan, profesionalisme, tanggap kebutuhan, pelibatan pemangku kepentingan, kolaboratif, akuntabilitas, pengawasan, dan efektif serta efisiensi.

Pada Triwulan IV Tahun 2024 telah dilakukan rangkaian kegiatan untuk membahas strategi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa topik pembahasan meliputi kajian hukum, analisis pelaksanaan UU Desa, analisis faktor internal dan eksternal, analisis SWOT, Grand Disain Pelaksanaan UU Desa 2025-2045, serta Peta Jalan Pelaksanaan UU Desa 2025-2029. Selanjutnya, telah dilaksanakan uji publik terhadap Strategi Pelaksanaan Undang-Undang Desa yang telah dihasilkan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kajian Penyusunan Model Pengembangan Perdesaan Lestari Berkelanjutan dan kajian Monitoring dan Evaluasi Akhir P3PD. Setelah dilakukan pengumpulan data di delapan (8) Kabupaten pada Triwulan III Tahun 2024, pada Triwulan IV Tahun 2024 dilakukan penyusunan Model Pengembangan Perdesaan Lestari Berkelanjutan serta dilakukan uji publik untuk memperoleh masukan perbaikan. Berdasarkan masukan tersebut, telah disusun laporan akhir Model Pengembangan Perdesaan Lestari Berkelanjutan. Untuk kajian Monitoring dan Evaluasi Akhir P3PD telah dilaksanakan pengumpulan data di 10 Kabupaten yang mencakup 82 desa yang mewakili desa *treatment* dan desa *control*. Pemilihan desa *treatment* dan desa *control* juga diusahakan mewakili status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Setelah pengumpulan data, dilakukan penyusunan laporan akhir Monitoring dan Evaluasi Akhir P3PD.
2. Penyusunan Strategi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Untuk menyusun Strategi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa telah dilakukan pengumpulan data di 800 desa pada 20 Kabupaten lokus P3PD. Hasil data lapangan sudah disusun dalam laporan akhir Strategi

Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Selain itu pada Triwulan IV Tahun 2024 juga telah dilaksanakan penyusunan kajian peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa.

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) pelaksanaan P3PD dilaksanakan melalui kunjungan kerja menko di Kabupaten Wonosobo dan Jombang serta beberapa Rakor di Jakarta dengan melibatkan Kemendagri, Bappenas, KemendesPDTT, TNP2K, Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Pendamping Desa, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa di beberapa lokasi.

Berikut Laporan Realisasi PHLN dan Ikhtisar Pinjaman Luar Negeri pada Kemenko Bidang PMK

**LAPORAN REALISASI PHLN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA NOMOR REGISTER 1CZ6CF2A  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 2024**

( Dalam Rupiah )

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran	Realisasi
<b>A. Pendapatan Hibah</b>				
Penerimaan Hibah Luar Negeri				
Jumlah Pendapatan Hibah				
<b>B. Belanja yang Bersumber dari PHLN:</b>	<b>30.150.00.000</b>	<b>23.978.524.320</b>	<b>79,53</b>	<b>9.997.599.320</b>

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI  
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
PER 31 DESEMBER 2024**

No	Keterangan	Pinjaman Luar Negeri P3PD
1	Nama Pinjaman Luar Negeri	Institutional Strenghtening for Improved Village Service Delivery (P165543)
2	Pemberi Pinjaman	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
3	Nama Proyek	Institutional Strenghtening for Improved Village Service Delivery/Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)
4	<i>Loan ID</i>	8941-ID
5	No. Register	1CZ6CF2A
6	<i>Date Sign</i>	23 Januari 2020
7	<i>Date Effective</i>	19 Februari 2020
8	<i>Closing Date</i>	31 Desember 2024
9	<i>Loan Amount</i>	Rp. 44,400,000,000 (3.000.000 USD)
10	<i>Disbursement s.d 2024</i>	Rp. 38,204,111,426
11	<i>Disbursement pada tahun 2024</i>	Rp. 23,978,254,320
12	Belanja Tahun 2024	
13	a. Belanja Barang	Rp. 23,978,254,320
14	b. Belanja Modal	-
15	Neraca (Rupiah)	-
16	a. Aset Lancar	-
17	b. Aset Tetap	-
18	c. Aset Lainnya	-
19	d. Kewajiban	-
20	<i>Executing Agency</i>	Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK (Komponen 3)
21	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK

- b. Pinjaman Luar Negeri Tidak Langsung (*Indirect Loan*), yaitu skema *PforR* (*Partnership for Results*). Pinjaman ini tidak masuk ke DIPA Kemenko Bidang PMK. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia melalui program yang disebut *National Health Insurance Reforms and Program-for-Results (JKN Reforms PforR)* telah berupaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta dukungan formulasi dan implementasi kebijakan program JKN Indonesia. *JKN Reforms PforR* merupakan satu program yang dilaksanakan bersama 4 Kementrian/Badan yaitu Kemenkes, Kemenkeu, DJSN, dan BPJS Kesehatan.

*JKN Reform and Results Program* bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta dukungan formulasi dan implementasi kebijakan program JKN Indonesia yang melibatkan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Kementerian Keuangan serta koordinasi bersama dengan kementerian PMK dan Kementerian PPN/Bappenas.

DLI 8 berperan mengawal kinerja BPJS Kesehatan dan melaporkan kinerja JKN secara keseluruhan. DJSN menyajikan Informasi Capaian Kinerja dan mengembangkan dashboard untuk pihak internal dan eksternal. Dashboard untuk pihak eksternal/publik berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, kegiatan peningkatan kapasitas sehubungan dengan asuransi kesehatan, analisis layanan kesehatan, dan akuntabilitas publik juga akan membantu penyusunan laporan tahunan yang akan merangkum kinerja JKN.

Terdapat 2 (dua) DLR dari DLI 8 berdasarkan PAD yaitu:

- DLR 8.1 : DJSN telah mengembangkan dashboard Indikator Capaian Kinerja (ICK) dari BPJS-K dan sumber lainnya.
- DLR 8.2 : DJSN telah membuat dan mempublikasikan laporan kinerja tahunan JKN Tahun ke 2 (tahun 2023).

*Target capaian dan total capaian per DLR baik yang sudah diverifikasi maupun belum diverifikasi sampai Triwulan IV Tahun 2024*

No. DLI	DLI	DLR	Target	Total Capaian
8	Peningkatan Kualitas Proses Perumusan Kebijakan dan Pengawasan JKN - DJSN	DLR 8.1=DJSN has developed a dashboard of key monitoring indicator (Un-Scalable)	1 dokumen	1 dokumen
		DLR 8.2= 3 Laporan Tahunan (Scalable)	1 dokumen	1 dokumen

**Pencapaian DLR 8.1 & 8.2:**

Penanggung Jawab	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
DLI 8	Peningkatan Perumusan Kebijakan dan Pengawasan JKN
Target DLR 8.1	DJSN telah mengembangkan dashboard Indikator Capaian Kinerja (ICK) dari BPJS-K dan sumber lainnya
Target DLRs 8.2	DJSN telah membuat dan mempublikasikan laporan kinerja tahunan JKN Tahun ke 2
Polarisasi ukuran DLR 8.1	Tidak <i>Scalable</i>
Polarisasi ukuran DLRs 8.2	<i>Scalable</i>
Simpulan DLR 8.1	Tercapai dan telah diverifikasi BPKP Tahap 1

*(Sumber : Laporan Progress Capaian DLI PforR)*

Pada *Program for Result National Health Insurance (PforR JKN)*, DJSN bertugas memimpin *Disbursement Linked Indicator (DLI) 8.2*, yaitu DJSN telah membuat dan mempublikasikan di website laporan kinerja JKN dari tahun kedua hingga keempat (2023-2025). Selain itu DJSN juga melaksanakan *Agreed Action* dan *Program Action Plan (PAP)* sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Pada tahun 2023 sampai 2024 DJSN telah melakukan serangkaian pengembangan *dashboard* SISMONEV JKN seperti pembuatan tampilan baru, publikasi Indikator Capaian Kinerja (ICK) BPJS Kesehatan, publikasi laporan, penambahan fitur download data, dan dual bahasa. Adapun *dashboard* tersebut dapat diakses melalui <https://kesehatan.djsn.go.id/>.

Berdasarkan target dan item verifikasi *Disbursement Linked Indicator (DLI) 8.2* yang telah ditetapkan dalam *Program Appraisal Document/PAD*, seluruh indikator telah dipublikasikan di SISMONEV JKN. Dalam hal ini capaian DLI 8.2 telah berstatus “Tercapai”. Namun, SISMONEV JKN perlu terus dilakukan *update* data, pengembangan fitur serta penyempurnaan *database* dan server sesuai dengan kebutuhan DJSN dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu untuk menyempurnakan SISMONEV JKN akan terus dilakukan optimalisasi kinerja tenaga ahli yang disediakan oleh Sekretariat PforR. (Laporan Terlampir).

Alokasi DIPA Sekretariat DJSN Tahun Anggaran 2023 dalam mendukung Sismonev:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT		PAGU	REALISASI	%
1	CL.6337.	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1.500.000.000	1.286.238.813	87,75
	FAB.001.	Sistem Monitoring (Dashboard) Data dan Informasi Program Jaminan Sosial dan capaian Kinerja BPJS			

Alokasi DIPA Sekretariat DJSN Tahun Anggaran 2024 dalam mendukung Sismonev:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT		PAGU	REALISASI	%
1	CL.6337.	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	38.356.000	35.102.000	91,52
	PBN.001.	Kajian dan Telaahan Penyelenggaraan SJSN			
	155.0A.	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Terpadu Jamsos Bidang Kesehatan dan Jamsos Bidang Ketenagakerjaan			

Sismonev dikelola oleh staf Sekretariat DJSN yang bersumber dari data dan laporan yang diterima dari BPJS. DIPA realisasi Sekretariat DJSN yang mendukung pengembangan dan keberlangsungan Sismonev berupa kegiatan rapat dalam kantor dalam rangka pembahasan Sismonev dan Sewa Lisensi aplikasi big data dan Business. Kebijakan Akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebijakan-kebijakan Akuntansi lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

3. Hibah Langsung Luar Negeri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Hibah Langsung Luar Negeri Bentuk Uang. Hibah ini merupakan hibah yang masuk dalam DIPA Kemenko Bidang PMK, yaitu pada Satker Setkemenko Bidang PMK. Berikut ringkasan hibah langsung dari UNICEF:

No	Keterangan	Hibah Langsung Bentuk Uang (UNICEF)
1.	Nama Pemberi Hibah	: UNICEF
2.	Nama Hibah	: <i>Programme Document Coordinating Ministry for Human Development and Culture and UNICEF August 2022 – December 2025</i>
3.	Tanggal	: 1 Agustus 2022
4.	Nomor Register	: 2E3K1TFA
6.	Nama Penerima Hibah	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
7.	Masa Berlaku Hibah	: 1 Agustus 2022 – 31 Desember 2025
8.	Jumlah Total Hibah yang diterima (dalam bentuk uang)	: Rp 3.837.492.000,- (berdasarkan kurs JISDOR BI 1 Agustus 2022, Rp 14.874,-) = USD 258.000
9.	Jumlah Hibah yang telah digunakan s.d. tahun lalu	: Rp 248.793.000,-
	Jumlah hibah yang digunakan tahun ini	: Rp 593.120.916,-
	Rincian:	
	a. Belanja Pegawai (51)	: -
	b. Belanja Barang (52)	: Rp 593.120.916,-
	c. Belanja Modal (53)	: -
	d. Bantuan Sosial (57)	: -
10.	Sisa Hibah	: Rp 2.995.578.084
11.	Surat Ijin Pembukaan Rekening	: Surat No. -WPB.12/KP00035408/2023 tanggal 03 Mei 2023

- b. Hibah Langsung Luar Negeri Bentuk Jasa. Hibah ini merupakan hibah langsung yang tidak masuk ke dalam DIPA Kemenko PMK. Terdapat lima jenis Hibah Langsung bentuk Jasa Tahun 2024, sebagaimana uraian berikut:
- Hibah dari *Friedrich Ebert Stiftung* (FES), yang pelaksanaan programnya pada Satker Setkemenko Bidang PMK, Satker Deputi 1, Satker Deputi 2, Satker Deputi 3, Satker Deputi 4, dan Satker Deputi 5. Berikut ringkasan hibah langsung bentuk jasa dari FES:

No	Keterangan		Hibah Langsung Bentuk Jasa (FES)
1.	Nama Pemberi Hibah	:	<i>Friedrich Ebert Stiftung (FES)</i>
2.	Nama Hibah	:	Program Pembangunan Manusia untuk Mempercepat Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
3.	Tanggal	:	10 Maret 2022
4.	Nomor Register	:	2LZBCVHA
5.	Nama Penerima Hibah	:	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
6.	Masa Berlaku Hibah	:	10 Maret 2022– 9 Maret 2025
7.	Jumlah Total Hibah yang diterima (dalam bentuk jasa) Tahun 2024	:	Rp4.996.221.082
	a. Belanja Pegawai (51)	:	-
	b. Belanja Barang (52)	:	Rp4.996.221.082
	c. Belanja Modal (53)	:	-
	d. Bantuan Sosial (57)	:	-
8.	Sektor Pembiayaan	:	Peningkatan Kesejahteraan Sosial; Peningkatan Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana; Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan; Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama; Promosi Indonesia sebagai Rujukan bagi Negara Lain di Kawasan maupun di tingkat Internasional di bidang Pembangunan Manusia; Peningkatan Kapasitas dan Keahlian Pegawai di Lingkungan Kemenko PMK

- Hibah dari *Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)*, yang pelaksanaan programnya pada Satker Setkemenko Bidang PMK. Berikut ringkasan hibah langsung bentuk jasa dari DFAT:

No	Keterangan		Hibah Langsung Bentuk Jasa (DFAT)
1.	Nama Pemberi Hibah	:	<i>Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)</i>
2.	Nama Hibah	:	Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang Komprehensif, Inklusif, dan Adaptif (PROAKTIF) Indonesia-Australia
3.	Tanggal	:	20 Februari 2023
4.	Nomor Register	:	2V6PXMMA
5.	Nama Penerima Hibah	:	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
6.	Masa Berlaku Hibah	:	20 Februari 2023 – 31 Desember 2025
7.	Jumlah Total Hibah yang diterima (dalam bentuk jasa) Tahun 2024	:	Rp49.018.843.224
	a. Belanja Pegawai (51)	:	-
	b. Belanja Barang (52)	:	Rp49.018.843.224
	c. Belanja Modal (53)	:	-
	d. Bantuan Sosial (57)	:	-
8.	Sektor Pembiayaan	:	Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang Komprehensif, Inklusif, dan Adaptif

- Hibah dari *Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) yang pelaksanaan programnya pada Satker Deputy 6. Berikut ringkasan hibah langsung bentuk jasa dari GIZ:

No	Keterangan	Hibah Langsung Bentuk Jasa (GIZ)
1.	Nama Pemberi Hibah	: <i>Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)</i>
2.	Nama Hibah	: Proyek Kerja Sama Teknis Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Kejuruan / <i>Technical Cooperation Project TVET System Reform</i>
3.	Tanggal	: 28 Agustus 2021
4.	Nomor Register	: 2V71C36A
5.	Nama Penerima Hibah	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
6.	Masa Berlaku Hibah	: 28 Agustus 2021 – 31 Maret 2025
7.	Jumlah Total Hibah yang diterima (dalam bentuk jasa) Tahun 2024	: Rp2.138.416.178
	a. Belanja Pegawai (51)	: -
	b. Belanja Barang (52)	: Rp2.138.416.178
	c. Belanja Modal (53)	: -
	d. Bantuan Sosial (57)	: -
8.	Sektor Pembiayaan	: Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Kejuruan

- Hibah dari Kamar Dagang dan Industri Trier Jerman (*IHK Trier*) yang pelaksanaan programnya pada Satker Deputy 6. Berikut ringkasan hibah langsung bentuk jasa dari IHK Trier:

No	Keterangan	Hibah Langsung Bentuk Jasa (IHK Trier)
1.	Nama Pemberi Hibah	: <i>Kamar Dagang dan Industri Trier Jerman (IHK Trier)</i>
2.	Nama Hibah	: Implementasi Program Kemitraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia
3.	Tanggal	: 02 Februari 2023
4.	Nomor Register	: 2HAB6ZFA
5.	Nama Penerima Hibah	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
6.	Masa Berlaku Hibah	: 02 Februari 2023 – 31 Maret 2024
7.	Jumlah Total Hibah yang diterima (dalam bentuk jasa) Tahun 2024	: Rp1.252.696.000
	a. Belanja Pegawai (51)	: -
	b. Belanja Barang (52)	: Rp1.252.696.000
	c. Belanja Modal (53)	: -
	d. Bantuan Sosial (57)	: -
8.	Sektor Pembiayaan	: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

- Hibah dari *Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) yang pelaksanaan programnya pada Satker Sekretariat DJSN. Berikut ringkasan hibah langsung bentuk jasa dari GIZ:

No	Keterangan	Hibah Langsung Bentuk Jasa (GIZ)
1.	Nama Pemberi Hibah	: <i>Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit</i> (GIZ)
2.	Nama Hibah	: Program Migrasi dan Diaspora
3.	Tanggal	: 01 Juli 2021
4.	Nomor Register	: 2JZB4NPA
5.	Nama Penerima Hibah	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
6.	Masa Berlaku Hibah	: 01 Juli 2021 – 30 September 2024
7.	Jumlah Total Hibah yang diterima (dalam bentuk jasa) Tahun 2024	: Rp2.386.470.695
	a. Belanja Pegawai (51)	: -
	b. Belanja Barang (52)	: Rp2.386.470.695
	c. Belanja Modal (53)	: -
	d. Bantuan Sosial (57)	: -

- c. Hibah Langsung Luar Negeri Bentuk Barang. Hibah ini merupakan hibah langsung berupa barang yang diterima oleh Satker Deputi 6 dari *Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ). Berikut ringkasan hibah langsung bentuk barang dari GIZ:

No	Keterangan	Hibah Langsung Bentuk Barang (GIZ)
1.	Nama Pemberi Hibah	: <i>Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit</i> (GIZ)
2.	Nama Hibah	: Proyek Kerja Sama Teknis Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Kejuruan / Technical Cooperation Project TVET System Reform
3.	Tanggal	: 28 Agustus 2021
4.	Nomor Register	: 2V71C36A
5.	Nama Penerima Hibah	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
6.	Masa Berlaku Hibah	: 28 Agustus 2021 – 31 Maret 2025
7.	Jumlah Total Hibah yang diterima (dalam bentuk barang) Tahun 2024	: Rp524.550.500
	a. Aset Tetap (13)	: Rp519.117.500
	b. Belanja Barang (52)	: Rp5.433.000
	c. Belanja Modal (53)	: -
	d. Bantuan Sosial (57)	: -

4. Pembentukan Kabinet Merah Putih telah menghasilkan struktur kementerian baru, di antaranya adalah Kementerian Koordinator Bidang PM (Kemenko PM) dan Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Adanya pembentukan kementerian/lembaga baru tersebut mengakibatkan sebagian aset tetap milik

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), khususnya dalam kelompok peralatan dan mesin, digunakan oleh Kemenko PM dan BP Taskin. Rincian lebih lanjut mengenai aset tetap peralatan dan mesin dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	BP Taskin		Kemenko PM		Total	
		Unit	Harga Perolehan	Unit	Harga Perolehan	Unit	Harga Perolehan
1	A.C. Sentral			2	60.606.000	2	60.606.000
2	A.C. Split	1	5.699.000			1	5.699.000
3	Alat Penghancur Kertas	1	4.162.500			1	4.162.500
4	Alat RT Lainnya			1	2.053.500	1	2.053.500
5	Alat Rumah Tangga Lainnya			3	7.381.500	3	7.381.500
6	Alat Rumah Tangga Lainnya	2	3.130.200	2	2.247.750	4	5.377.950
7	Bracket Standing Peralatan	1	2.899.000			1	2.899.000
8	Charger	1	1.799.000			1	1.799.000
9	Dispenser	5	12.864.000			5	12.864.000
10	Electric Boiler	1	1.431.000			1	1.431.000
11	Handy Talky (HT)	15	120.000.000	22	164.200.000	37	284.200.000
12	Humidifier	4	25.212.096			4	25.212.096
13	Kamera Digital	1	39.958.890	1	64.935.000	2	104.893.890
14	Kasur/Spring Bed			2	10.850.250	2	10.850.250
15	Kursi Besi/Metal	93	127.627.000	18	62.536.400	111	190.163.400
16	Kursi Kayu	7	7.560.000	2	10.212.000	9	17.772.000
17	Lap Top	3	75.300.000			3	75.300.000
18	Layar LCD Projector	1	1.720.500			1	1.720.500
19	LCD Projector/Infocus	2	14.047.200			2	14.047.200
20	Lemari Besi/Metal	2	5.480.000			2	5.480.000
21	Lemari Es	2	8.538.000			2	8.538.000
22	Lemari Kayu	4	15.120.000	4	84.742.950	8	99.862.950
23	Lensa Kamera	1	9.988.668	1	39.959.999	2	49.948.667
24	Meja Kerja Kayu	29	118.399.000	12	63.045.200	41	181.444.200
25	Meja Makan Kayu	4	8.719.060	7	33.966.000	11	42.685.060
26	Meja Rapat	2	21.200.000			2	21.200.000
27	Meja Resepsionis	1	7.200.000			1	7.200.000
28	Meja Ruang Tamu	3	20.577.942			3	20.577.942
29	Mesin Absensi			3	18.450.000	3	18.450.000
30	Mesin Penghisap Debu/Vacu	1	5.311.350			1	5.311.350
31	Microw ave	3	4.847.000			3	4.847.000
32	Printer	12	41.365.965	17	39.862.500	29	81.228.465
33	Scanner	2	30.436.200			2	30.436.200
34	Sofa	14	189.624.335	3	94.905.000	17	284.529.335
35	Tablet PC	1	24.196.000	1	20.548.000	2	44.744.000
36	Televisi	2	23.198.000			2	23.198.000
37	Tripod	1	2.197.800			1	2.197.800
38	Vertikal Blind			2	8.089.735	2	8.089.735
39	Voice Recorder			2	3.453.580	2	3.453.580
	<b>Jumlah</b>	<b>222</b>	<b>979.809.706</b>	<b>105</b>	<b>792.045.364</b>	<b>327</b>	<b>1.771.855.070</b>